

PROBLEMATIKA PANDEMI COVID-19

Perspektif Kritis Lembaga Mahasiswa FISIP UMJ

Prolog: Dr. Ma' mun Murod Al Barbasy, M.Si.
Epilog: Djoni Gunanto, S.IP., M.Si.

Editor: Djoni Gunanto, S.IP., M.Si.

Asyraf Al Faruqi Tuhulele, Muhammad Sulaiman, Harits Kholilurrahman, Jodhi Hermawansyah, Raja Faizd El Shidqi, Rival Laosa, Assyiffah Aulia, Annisa Miskiyah, Ennike Rahayu Lestari, Risma Wati, Ulung Diah Rahmawati, Mia Nur Safitri, Fajar Raditya Fadhillah, M. Febrion Ali, Mohammad Riza Fathoni, Adrika Febriany Putri, Arief Mardiansyah

Semesta Irfani Mandiri

Problematika Pandemi Covid-19

Perspektif Kritis Lembaga Mahasiswa FISIP UMJ

Penulis: Asyraf Al Faruqi Tuhulele, Muhammad Sulaiman, Harits Kholilurrahman,
Jodhi Hermawansyah, Raja Faizd El Shidqi, Rival Laosa, Assyiffah Aulia,
Annisa Miskiyah, Ennike Rahayu Lestari, Risma Wati, Ulung Diah Rahmawati,
Mia Nur Safitri, Fajar Raditya Fadhillah, M. Febrian Ali, Mohammad Riza Fathoni,
Adrika Febriany Putri, Arief Mardiansyah

Editor: Djoni Gunanto, S.IP., M.Si.

Layout: Ahmad Soleh

Desain Sampul: Tim Penerbit Irfani

Cetakan I, Desember 2021

Ukuran, tebal: 14x20 cm, x + 108 halaman

ISBN: (dalam proses)

Diterbitkan oleh:

CV. Semesta Irfani Mandiri

Jln. Al-Hukama, Gg Haji Jawahir no 57, Rangkapan Jaya Baru,
Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

E-mail: penerbitirfani@gmail.com

Website: www.irfanibuku.com

Instagram: @penerbitirfani dan @irfani_mom

WhatsApp: 0877 8927 2795

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang menyalin dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di semua negara, telah memberikan dampak yang cukup berat pada sendi kehidupan, khususnya sektor ekonomi. Demikian halnya dengan Indonesia, kebijakan pembatasan aktivitas bagi masyarakat (*social distancing*) berimplikasi pada penurunan kegiatan bisnis. Beberapa perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Persoalan lain juga tampak pada masyarakat yang dinyatakan positif dan harus dirawat serta dikarantina. Persoalan ekonomi yang muncul sebagai akibat Pandemi Covid-19, merangsang lahirnya gerakan filantropi di Indonesia, salah satunya adalah keberadaan IMM yang cepat merespon kondisi sosial dalam masa pandemi ini.

Gerakan filantropi terlihat saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19 pada awal Maret 2020. Lembaga non-pemerintah bergerak mengumpulkan donasi tanggap Covid-19 dengan berbagai metode. Masyarakat juga menyumbang dalam bentuk barang seperti alat pelindung diri (APD) berupa masker, *handscoen*, *hazmat suit*, pelindung mata, dan barang lainnya.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki ranah gerak dalam konteks keagamaan, keilmuan, dan kemasyarakatan. Tiga ranah gerak ini sering disebut juga dengan trilogi. Selain itu, kader-kader IMM yang sering kita kenal dengan Immawan dan Immawati juga ditanamkan untuk memiliki kompetensi dasar yang melekat dalam diri mereka, yaitu religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Maka dari itu, pandemi yang melanda dunia hari ini menjadi tugas bersama kader-kader IMM dalam akselerasi tugas kemasyarakatan yang utuh dan terukur.

Gerakan sosial (*social movement*) sebagai fokus gerakan mahasiswa di masa sekarang tidak hanya melalui unjuk rasa atau demonstrasi. Mahasiswa bisa mengekspresikan pemihakannya dengan cara-cara alternatif namun solutif di masa sulit akibat pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti ini tanpa persatuan Indonesia kita tidak akan bisa selesai. Tidak ada yang *the best* di sini, kita saling belajar dalam mengelola pandemi, gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa tidak boleh ketinggalan zaman.

Pemikiran-pemikiran yang logis dan ilmiah dituangkan oleh mahasiswa dalam sebuah bingkai gerakan filantropi IMM di tengah pandemi ini merupakan hal yang sangat baik sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah bangsa dan negara tercinta ini.

Wassalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.

Dekan FISIP UMJ

Dr. Evi Satsipi, M.Si.

Prakata

Dua tahun berlalu sejak identifikasi awal sebuah virus baru yang diduga bersumber dari sebuah kawasan di Tiongkok sana. Masih hangat rasanya untuk mengingat bagaimana hebohnya dunia menyikapi kemunculan makhluk tak kasat mata itu. Hampir semua sendi kehidupan lumpuh yang berakibat langsung kepada pola hidup dan nasib warga dunia. Tak sedikit yang harus merengang nyawa, tak sedikit pula yang harus kehilangan harapan. Termasuk dunia pergerakan mahasiswa di Indonesia yang harus padam bagai lilin yang kehabisan bahan bakar.

Buku ini bercerita dengan seksama perihal kehidupan dunia kampus selama pandemi Covid-19, khususnya di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebuah warna baru yang harus terukir di dalam buku sejarah manapun, bahwa pergerakan mahasiswa, bagaimanapun hebat dan kokohnya, akan tetap tunduk kepada kuasa semesta. Tak banyak yang bisa dilakukan bahkan dengan tulisan tajam jemari mahasiswa di berbagai kanal media. Pada mulanya kita harus mengakui bahwa idealisme harus mengalah pada keadaan dan kondisi yang tak ideal. Tapi, sampai kapan?

Awal tahun 2020 saat kelas-kelas dibubarkan, mahasiswa masih gelagapan menghadapi kenyataan bahwa dunia kampus tak lagi sama. Aktivitas mahasiswa bagai dipasung dan hanya menyisakan jari jemarinya untuk terus bersuara. Butuh waktu hitungan bulan hingga beberapa inovasi muncul ke permukaan yang diinisiasi oleh mahasiswa. Konsistensi

mahasiswa pada budaya yang usang terbukti tak menghasilkan apa-apa saat diterpa pandemi ini. Ketika dihadapkan pada kondisi yang tak ideal ini, idealisme mahasiswa harus memilih antara konsistensi (terhadap budaya dan nilai-nilai lama) atau relevansi (bergerak dan beradaptasi secara terus menerus mengikuti budaya dan nilai-nilai baru).

Pada akhirnya mahasiswa akan terus beradaptasi agar tetap relevan. “Relevansi adalah konsistensi pada gerak (pergerakan)”, kata Budiman Sudjatmiko di akun Twitter-nya. Manusia harus terus bergerak dalam menyesuaikan dirinya, secara konsisten. Penyesuaian diri mengantarkan umat manusia menuju inovasi teknologi. Terkadang teknologi sengaja dibuat untuk mempertahankan umat manusia dari ancaman kepunahan. Salah satu inovasi yang menjadi kebiasaan baru saat ini—dalam rangka menjaga umat manusia dari kepunahan—adalah aplikasi *video conference* seperti Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Team, dan lain sebagainya. Melalui berbagai kanal baru tersebutlah gemuruh pergerakan mahasiswa kembali mencuat, walau masih harus secara virtual.

Dalam menyikapi isu-isu sosio-politik nasional, mahasiswa FISIP UMJ dituntut untuk terus kritis dan meramaikan ruang-ruang diskusinya. Berbagai macam peristiwa dan fenomena telah terjadi sepanjang tahun. BEM dan DPM FISIP UMJ misalnya, mereka akan terus dituntut untuk mengamati jalannya badan eksekutif dan legislatif negara sepanjang pandemi berlangsung ini. Tak heran jika gejolak riuh demonstrasi mahasiswa kerap muncul sebagai respon mereka terhadap kondisi negara ini.

Dalam hal aktivisme mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat FISIP UMJ

dapat mengisi ruang untuk menjelaskan aktivisme mahasiswa yang berbasis keumatan. Aktivis IMM seyogyanya tetap menjadi penjaga nalar publik dengan aspirasi dan inspirasi yang diberikannya. Tak lupa juga Muhammadiyah yang selalu berkhidmat untuk negeri dengan menyalurkan segala yang dimiliki untuk keselamatan Indonesia selama pandemi ini. Menurut laporan, Muhammadiyah terhitung telah menggelontorkan bantuan senilai lebih dari satu triliun rupiah, angka yang fantastis untuk sebuah ormas Islam.

Terlebih lagi dengan adanya Himpunan Mahasiswa Jurusan di FISIP UMJ yang selalu relevan untuk membahas dan mendiskusikan isu sosio-politik di negeri ini. Mereka memiliki fokus pada bidang-bidang yang lebih khusus: Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial (HMKS) yang bisa berbicara mengenai Kesejahteraan Sosial masyarakat selama pandemi; Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (Himia) yang membahas persoalan birokrasi dan kebijakan publik selama pandemi ini; Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) yang dengan lugas membahas situasi dan gejolak politik selama pandemi berlangsung; dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) yang secara spesifik memberikan pandangan mengenai komunikasi publik para pemangku kepentingan serta masalah komunikasi umum lainnya.

Atau jika berbicara mengenai kehidupan kampus yang gemerlap berkat hadirnya lembaga-lembaga peminatan di FISIP UMJ, mereka memiliki kisah tersendiri dalam menghadapi pandemi. Ada Lembaga Musik Pervagatus, Safimta, dan HW FC. Walau aktivitas mereka masih terbatas, bukan berarti suara mereka bisa dibatasi. Mereka akan memberikan pandangan mengenai masing-masing bidang peminatannya dalam

menghadapi pandemi Covid-19 ini serta inovasi yang akan muncul ke depannya.

Relevansi mengantarkan mahasiswa untuk berpikir ulang bagaimana cara agar tetap eksis di tengah keterbatasan. Mahasiswa dari berbagai Lembaga Kemahasiswaan FISIP UMJ di dalam buku ini memberikan testimoninya mengenai tantangan dan inovasinya untuk tetap bersinar bagai lilin yang tersambar api. Berbagai opini dan kisah unik dari masing-masing lembaga ini menarik untuk dibaca dan dijadikan ukuran bahwa aktivisme mahasiswa tetap bisa hidup.

Relevansi yang menjadi dasar lahirnya inovasi mahasiswa perlu untuk tetap dinyalakan. Lahirnya buku ini adalah respons terhadap keharusan mahasiswa untuk terus relevan, beradaptasi dengan keadaan. Tak ada yang bisa membatasi derasnya arus perubahan. Kita lah yang harus menyediakan wahana untuk mengarungi derasnya arus itu. Melalui buku ini, jalan aktivisme mahasiswa akan terus membara.

Kami ucapkan selamat membaca!

Daftar Isi

Kata Pengantar | iii

Prakata | v

Daftar Isi | ix

Prolog: “Menebar ‘Virus’ Tradisi Menulis di Kalangan Mahasiswa” oleh Dr. Ma’mun Murod Al Barbasy, M.Si. | 1

Bab I - Demokrasi, Politik, dan Gerakan Mahasiswa

- Praksis Gerakan Filantropi IMM di Tengah Pandemi - Asyraf Al Faruqi | 6
- Demokrasi Organisasi Mahasiswa di Tengah Pandemi - Raja Faidz El Shidqi | 11
- Problematika Praktik Politik Dunia di Masa Pandemi - Rival Laosa dan Assyiffah Aulia | 15
- Problematik Pandemi Covid-19, Mahasiswa Bisa Apa? - Muhamad Sulaiman | 26
- Strategi Komunikasi dalam Menghadapi Krisis Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Mahasiswa tentang Covid-19 - Arief Mardiansyah | 30

Bab II - Pariwisata, Budaya, dan Olahraga

- Covid-19 pada Sektor Pariwisata - Ennike Rahayu | 37
- Melestarikan dan Mempertahankan Budaya Seni Tari di Masa Pandemi - Adrika Febriany Putri | 41
- Sepak Bola dan Futsal dalam Adaptasi Kebiasaan Baru - Muhammad Febrian Ali | 45

- Dunia Musik dan Pandemi - Muhammad Riza Fathoni | 51

BAB III - Pendidikan dan Pelayanan Publik

- Polemik Biaya Pendidikan Kuliah Saat Pandemi Covid-19 - Harits Kholilurrohman | 56
- Meningkatkan Performa Digitalisasi Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19 - Annisa Miskiyah | 59
- Transformasi dan Tantangan Pelayanan Publik di Era New Normal - Risma Wati | 64
- *Public Trust* dalam *Agile Government* di Masa Pandemi Covid-19 - Ulung Diah | 68

Bab IV - Media dan Kesejahteraan Masyarakat

- Pemberitaan Media Komunikasi: Efektivitas dan Pengaruhnya pada Presepsi Masyarakat tentang Covid-19 - Jodhy Hermawansyah | 74
- Pandemi dan Menurunnya Tingkat Kesejahteraan - Mia Nursapitri | 83
- Hakikat Kesejahteraan bagi Masyarakat di Masa Pandemi - Fajar Raditya Fadhilah | 87

Epilog: “Disrupsi Pendidikan” oleh Djoni Gunanto, S.IP., M.Si. | 91

Profil Penulis

PROLOG:
MENEBAR 'VIRUS'
TRADISI MENULIS DI
KALANGAN MAHASISWA

Oleh: Dr. Ma'mun Murod Al Barbasy, M.Si.



Saya menyambut dengan bangga dan gembira atas terbitnya buku berjudul *Problematika Pandemi Covid-19; Perspektif Kritis Lembaga Mahasiswa FISIP UMJ*. Terbitnya buku ini menandakan bahwa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) masih ada tanda-tanda kehidupan para aktivis yang sekaligus juga menjadi penulis, sesuatu yang tidak gampang. Sebab di lingkup mahasiswa biasanya terbelah pada polarisasi yang sangat timpang, di mana sebagian besar (*mainstream*) mahasiswa berstatus sebagai mahasiswa “baik-baik” yang hanya fokus berkuliah, yang kerap disebutnya sebagai mahasiswa “kupu-kupu” (kuliah pulang-kuliah pulang). Sementara sebagian kecil mahasiswa berstatus sebagai aktivis. Saya sebut sebagian kecil, karena hanya pada kisaran sekitar 5% dari keseluruhan mahasiswa FISIP UMJ yang mau menjadi aktivis.

Di lingkup aktivis mahasiswa juga terbelah pada dua kelompok. Pertama, mahasiswa yang hanya sebatas menjadi aktivis tapi minim literasi. Kedua, aktivis mahasiswa yang kaya literasi dan mempunyai kemampuan tulis menulis. Kelompok kedua inilah yang saya amati dalam perkembangan beberapa tahun terakhir tumbuh subur di lingkup aktivis mahasiswa FISIP UMJ, hal yang tentu sangat membanggakan bagi diri saya.

Buku yang sekarang berada di tangan pembaca menjadi bukti nyata dari tumbuhnya kesadaran aktivis mahasiswa di lingkungan FISIP UMJ yang mempunyai kemampuan tulis menulis. “Virus” tradisi menulis ini penting untuk disebar di kalangan mahasiswa secara luas, agar daya tularnya bisa sedahsyat virus Covid-19.

Sebagai buku yang berisikan kumpulan tulisan, buku ini terbilang sangat kaya perspektif. Dan menariknya lagi, perspektifnya juga senafas dengan sikap dan positioning Muhammadiyah dalam penanganan Covid-19 yang berpikir sangat maju dan pro pada ilmu pengetahuan, tentu bukan berarti

mengesampingkan atau menafikan sepenuhnya hal yang berkenaan dengan aspek agama.

Sebagai organisasi keagamaan, tentu saja pandangan Muhammadiyah dalam hal apapun harus mempertimbangkan aspek keagamaan. Hanya saja, aspek keagamaan yang dimaksud adalah yang senafas dengan semangat Islam berkemajuan yang solutif dan sesuai dengan faham keagamaan Muhammadiyah. Bukan sikap keagamaan yang cenderung fatalistik atau kerap juga disebutnya sebagai neo-jabariyah, yang dianut oleh sebagian masyarakat kita.

Dalam menyikapi Covid-19, *positioning* Muhammadiyah sangat tegas bahwa virus Covid-19 itu ada dan terbukti telah merenggut banyak korban yang meninggal dunia. Karenanya dengan menerjunkan sumberdaya yang ada, relawan, amal usaha maupun sumber-sumber pendanaan yang dimilikinya, Muhammadiyah terjun secara total membantu pemerintah dalam penanganan virus Covid-19.

Bukan hanya itu, Muhammadiyah juga membangun, menyampaikan, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, putusan-putusan organisasi, dan pandangan-pandangan keagamaan yang mengajak masyarakat untuk memadukan tiga pendekatan sekaligus dalam menyikapi Covid-19, yaitu pendekatan *bayani* (teks), *burhani* (rasio), dan *irfani* (intuisi).

Tujuannya tentu untuk membangun kesadaran pola pikir masyarakat yang utuh atau multi-perspektif. Pentingnya menggunakan tiga pendekatan karena selama ini yang terjadi di masyarakat kerap dan bahkan dominan yang berkembang adalah pandangan serba mono-perspektif, sehingga bukan saja dangkal tapi juga saling menyalahkan di antara yang berbeda perspektif tersebut.

Menyikapi Covid-19, tegas dibutuhkan setidaknya dua kesadaran. Pertama, meyakini adanya qadha dan qadar. Dari perspektif keimanan, virus Corona—yang sudah merenggut

banyak nyawa—bagian dari qadha dan qadar. Ada ketentuan yang sesungguhnya sudah ditegaskan Allah SWT, misal dalam surat al-A'raaf ayat 34: “Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” Ditegaskan lagi pada ayat lainnya di surat al-Ankabut ayat 57: bahwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. “Qadha akan menjadi qadar (takdir) yang ketika itu sudah terjadi.

Mengutip, QS. al-Fajr ayat 27-30 misalnya, ketika seseorang yang baik meninggal, maka dia akan ditempatkan Allah di tempat yang sangat terhormat. Inilah sejatinya hidup, yaitu hanya menjalankan qadha dan qadar Allah SWT. Maka penting untuk membangun kesadaran bahwa apapun bencana yang terjadi dan menimpa kita adalah bagian qadha dan qadar Allah.

Kedua, bencana yang menimpa manusia terjadi dalam rumus kausalitas (sebab akibat). Dalam konteks kausalitas sebagaimana tersurat secara jelas dalam banyak ayat al-Qur'an bahwa apapun bencana yang menimpa kita sejatinya pemicunya adalah perilaku buruk kita sebagai manusia. Kalau kita mengkaji secara kritis “ayat-ayat bencana” dalam al-Qur'an, tegas menyebut bahwa penyebab terjadinya bencana Allah alamatkan kepada manusia. Manusalah sejatinya penyebab utama terjadinya semua bencana. Wujudnya bisa berupa buruknya tata kelola negara, pembiaran atas tumbuh subur nya perilaku korup di lingkup elit politik yang ditandai dengan pembuatan dan tetap dipertahankannya beragam kebijakan perundang-undangan yang terbukti berhasil membangun “tradisi” korup di lingkup elit politik.

Demikian sedikit prolog yang bisa saya tulis untuk terbitnya sebuah buku yang membanggakan, yang sekaligus bisa menjadi pemicu dan pemacu untuk terbitnya buku-buku berikutnya. Sekian. []

BAB I:
DEMOKRASI, POLITIK,
DAN GERAKAN
MAHASISWA



Praxis Gerakan Filantropi IMM di Tengah Pandemi

Asyraf al Faruqi, IMM FISIP UMJ

Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) mengagetkan seluruh orang bahkan negara diseluruh dunia, penyakit yang penyebarannya bermula dari Wuhan ini membuat banyak dampak yang sangat besar di seluruh sektor kehidupan terutama pada sektor ekonomi dan sosial. Banyak orang di PHK, usaha-usaha bangkrut, perusahaan tutup, dll. Karena semua orang dirumahkan dan pembelian menurun. Kebijakan pemerintah yang dinilai tak teratur dan terukur pun membuat banyak masyarakat makin sulit, bantuan sosial dikorupsi dan tidak merata, sampai kehilangan fokus untuk memitigasi pandemi kali ini dengan membuat undang-undang kontroversial seperti UU Cipta Kerja yang dinilai malah menguntungkan golongan oligarki saja.

Perubahan sosial dalam skala besar menuntut kita untuk adaptasi kebiasaan baru yang asing bagi masyarakat Indonesia, yang paling fundamental adalah memakai masker setiap keluar dari rumah dan mencuci tangan setiap kali ingin beraktifitas, berpindah aktifitas dari satu ke yang lainnya, hal ini menjadikan kebiasaan baru yang baik bagi masyarakat Indonesia saat ini.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki ranah gerak dalam konteks Keagamaan, Keilmuan, dan Kemasyarakatan. Tiga ranah gerak ini sering disebut juga dengan Trilogi, disamping itu kader-kader IMM yang sering kita kenal

dengan Immawan dan Immawati juga ditanamkan untuk memiliki kompetensi dasar yang melekat dalam diri mereka yaitu Religiusitas, Intelektualitas, dan Humanitas. Maka dari pada itu pandemic yang melanda dunia hari ini menjadi tugas bersama kader-kader IMM dalam akselerasi tugas Kemasyarakatan yang utuh dan terukur.

IMM dan kemanusiaan sebagai bentuk usaha aksiologi gerakan filantropi sudah jauh dilakukan sebelum adanya pandemi seperti dua tahun terakhir ini, dengan semboyannya yaitu “*fastabiqul khairat*” yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari sini IMM terus berupaya bergerak dan bertindak secara terukur dalam kebaikan khususnya dalam konteks kemanusiaan atau gerakan filantropi, mulai dari membuat gerakan kecil-kecilan seperti urun dana untuk membantu bencana, mengajar di pelosok-pelosok tempat yang membutuhkan perhatian pendidikan, sampai turun langsung untuk membantu membuat posko bencana, dan membantu mengentaskan problem pandemi.

Gerakan humanisme IMM sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Halim Sani dalam buku *Manifesto Gerakan Intelektual Profetik* merupakan sebuah karya buku yang membicarakan banyak konsep kemanusiaan yang dapat dibangun, diambil dari kajian Kuntowijoyo tentang ilmu sosial profetik yang menarasikan pemanusiaan manusia atau sebuah proses humanisasi yang memiliki landasan teosentris bukan terhadap antroposentris sebagai usaha transformasi kesadaran terhadap diri manusia yang benar-benar berlandaskan nilai agama. Dengan ini pendekatan gerakan filantropi IMM berdasar pada pendekatan humanisasi, liberasi, dan transendensi.

Praxis Gerakan IMM

IMM dalam akselerasi praxis krisis pandemi di Indonesia kali ini Dengan dimotori oleh Bidang Kesehatan DPP IMM dan gabungan dari beberapa bidang seperti Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Bidang Lingkungan Hidup, dll. Akhirnya dibentuklah satuan Gugus Tugas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Penanganan Covid-19. Dibentuknya gugus tugas ini adalah merupakan satu amanah yang disampaikan Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, bahwasannya IMM harus hadir disaat negara sedang di uji dengan pandemi seperti yang terjadi saat ini dan inisiasi dalam tubuh IMM sendiri untuk gotong royong meringankan beban negara kita ini.

IMM bekerja sama dengan beberapa gerakan filantropi yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang bukan pemerintah. Seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC), dan organisasi-organisasi pergerakan mahasiswa yang lainnya. Maka langkah-langkah yang diambil IMM diantara lain adalah:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pandemi Covid kali ini dan pencegahan tertularnya kepada individu masyarakat melalui media online maupun turun secara langsung dengan berkala.
2. IMM juga memberikan bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan seperti sembako, *hand sanitizer*, dan masker. Bukan hanya di tingkat pusat bahkan tingkat daerah-daerah, cabang, samapai komisariat semuanya kompak untuk bergerak urun dana dan daya gotong royong dalam mengakselerasikan

program ini, membuat program gerakan 10.000, kader bantu kader, gerakan *charity*, dll.

3. Bergabung dan bekerjasama untuk menjadi relawan Covid-19 yang dibutuhkan.
4. Membuat *call center* tanggap Covid disertai konsultasi gratis dokter bagi orang yang ingin bertanya terkait keluhan yang sedang dialaminya, penanggu-langannya, dan memberikan langkah-langkah konkrit untuk membantu.
5. Membantu pemerintah mengampanyekan untuk mendukung penuh program vaksinasi Covid serta bekerjasama untuk mengadakan vaksin di seluruh Indonesia secara merata. Terkhusus pada 48 titik di daderah Jawa-Sumatra dan 27 titik yang berada di Indonesia bagian Timur karena mengingat di daerah luar Jawa-Bali masih sangat minim dalam program vaksinasi, ditambah dengan vaksinasi yang diadakan oleh tingkat daerah dan cabang se-Indonesia.

Dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan sampai hari ini, IMM terus berbuat secara maksimal untuk mengaktualisasikan misi kemasyarakatan dalam aktualisasi kepribadian humanitas dalam diri kader itu sendiri. Spirit teologi Al-Maun yang ditularkan oleh Muhammad Darwis atau yang sering kita kenal sebagai Kyai Haji Ahmad Dahlan merupakan moti-vasi dalam tubuh IMM itu sendiri dalam pengejawantahan nalar kemanusiaan, gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta bergerak inklusif turun langsung dalam misi ini.

Mengutip perkataan Abdul Munir Mul Khan yaitu, “Awalnya gerakan yang dilakukan Kyai Ahmad Dahlan lebih

merupakan reformasi kemanusiaan berbasis etika welas asih, bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasar etika welas asih tersebut, maka Muhammadiyah tampak lebih bersikap terbuka pada modernitas dan kemanusiaan.”

Maka dengan ini IMM dengan gerakan praksisnya tegas menyatakan bahwasannya gerakan filantropi adalah gerakan yang sangat melekat dalam tubuh IMM dan kadernya, berdiri ditengah persoalan negara yang takan usai, dan selalu ikhlas beramal dalam bakti menggapai ridho Illahi. []

Demokrasi Organisasi Mahasiswa di Tengah Pandemi

Raja Faidz El Shidqi, Himapol FISIP UMJ

Seorang aktivis mahasiswa selalu identik dengan berbagai kesibukan organisasi atau hal lain di kampus, entah itu berupa kajian, rapat, pelaksanaan program kerja hingga melakukan regenerasi kepemimpinan organisasi dalam hal ini bisa berupa musyawarah besar, kongres, musyawarah mahasiswa atau lain sebagainya. Di Era Disrupsi seperti saat ini dimana berbagai macam inovasi dan perubahan besar-besaran muncul terlebih di ranah industri yang dikenal dengan sebutan revolusi industri 4.0 tentu seorang mahasiswa juga selayaknya dan memang seharusnya dapat menggawangi kegiatan-kegiatan yang menjadi upaya beradaptasi dengan perkembangan zaman minimal mulai menggunakan teknologi digital dalam setiap kegiatannya bukan hanya untuk publikasi media massa belaka.

Penggunaan teknologi digital dewasa ini dirasa kurang maksimal penggunaannya oleh teman-teman mahasiswa di beberapa Perguruan Tinggi, misalnya saja dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) untuk memilih Ketua BEM atau Organisasi Mahasiswa lainnya masih berupaya keras untuk dilaksanakan secara offline. Padahal, perlu diperhatikan bahwa situasi di Indonesia khususnya wilayah DKI Jakarta masih kusut akibat wabah pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai ini, syukur-syukur masih bisa diizinkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan secara offline meskipun di perguruan tinggi lainnya bahkan tidak bisa sama sekali, untuk memasuki area

kampus pun tidak diizinkan oleh Security atas perintah dari Pimpinan dengan pertimbangan menghindari kerumunan yang tidak diperlukan serta meminimalisir angka penyebaran Covid-19.

Penulis sendiri sangat paham mengapa sebisa mungkin pelaksanaan pemilihan umum itu dilaksanakan secara offline dengan alasan menghindari kecurangan-kecurangan yang berakibat rusaknya kualitas demokrasi yang ada. Namun, yang menjadi pertimbangan lainnya adalah banyaknya mahasiswa yang semenjak awal Pandemi Covid-19 ini muncul hingga saat ini memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya yang sebagian dari mereka berasal dari luar Jakarta bahwa luar pulau Jawa, sebagian lainnya yang bertempat tinggal tidak jauh dari perguruan tinggi pun tidak ada jaminan bahwa mereka akan diizinkan keluar rumah dan berkerumun di kampus hanya untuk memberikan satu hak suaranya dalam pemilihan umum, dan hal tersebut juga sama-sama merusak kualitas demokrasi karena banyaknya mahasiswa yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya ketika sedang berada jauh dari kampus.

Di Era Disrupsi seperti sekarang ini yang bisa dikatakan bahwa hampir semua hal berusaha untuk didigitalisasi tentu akan ada banyak persoalan-persoalan yang muncul terlebih jika memang suatu instansi atau organisasi tersebut baru pertama kali menerapkan sistem digital untuk kegiatan yang seharusnya dijalankan secara offline, minimnya pengalaman mengatur jalannya agenda secara online menjadi salah satu tantangan berat bagi siapa saja yang memilih untuk mencoba beradaptasi terhadap dunia digital. Memang betul bicara kualitas demokrasi terkhusus kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan di dalam suatu sistem memang tidak bisa dihindari, begitu juga jika

suatu hal dilaksanakan secara *offline* yang tidak ada jaminan bahwa kecurangan itu tidak akan ada. Namun, lagi-lagi suatu kecurangan maupun kesalahan sistem *offline* maupun online muncul karena adanya celah di dalam sistem itu sendiri yang memungkinkan seseorang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan.

Ketika kita berbicara tentang sebuah kecurangan atau cacatnya sebuah sistem yang harus dilakukan adalah mencari tahu letak kecacatan sistem tersebut dan memperbaikinya agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi atau tidak terulang kembali bukan justru membuang mentah-mentah sistem tersebut, apalagi memang baru pertama kali menggunakannya. Seperti yang sudah penulis singgung diatas bahwa semenjak awal pandemi hingga saat ini ada banyak sekali mahasiswa yang memutuskan kembali ke kampung halamannya dan sekalipun tempat tinggal mereka dekat dengan kampus belum tentu mendapatkan izin dari orang tuanya maka pilihan terbaik untuk menjangkau mereka yang berjarak adalah dengan menggunakan teknologi digital dalam hal ini metode online juga sebagai upaya agar setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak nya sebagai mahasiswa.

Jadi, sebagai seorang mahasiswa yang digadang-gadang *agent of change* atau agen perubahan semestinya seorang mahasiswa mampu memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam menghadapi sebuah persoalan yang cukup pelik bukan memaksa kehendak pribadi demi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilakukan.

Zaman menuntut kita untuk membuat sebuah inovasi dan untuk terus berinovasi bukan hanya ketika melaksanakan beberapa program kerja saja atau menggunakan media sosial

sebagai media informasi atas kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana akan tetapi betul-betul memanfaatkan media sosial dan teknologi digital dengan semaksimal mungkin selain sebagai ikhtiar menghindari penyebaran Covid-19 yang semakin banyak juga sebagai upaya mempersiapkan diri menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang mana semua orang akan bersaing satu sama lain bukan hanya antar warga negara Indonesia melainkan mancanegara. []

Problematika Praktik Politik Dunia di Masa Pandemi

Rival Laosa dan Assyiffah Aulia, Himapol FISIP UMJ

Dunia digoncangkan kedamaianannya di semua segi kehidupan oleh Pandemi Covid-19 yang telah menginfeksi jutaan bahkan ratusan juta manusia dan membunuh jutaan manusia pula di Dunia yang terhitung sejak pertama kali virus ini muncul di Wuhan China pada bulan November 2019. Peristiwa ini jelas banyak membawa perubahan di Dunia dari semua segi kehidupan terutama dalam bernegara.

Untuk membendung penyebaran virus lebih lanjut, pihak berwenang di seluruh dunia menerapkan langkah-langkah mengunci negara dan kota pada tingkat yang berbeda-beda. Termasuk menutup perbatasan, sekolah, tempat kerja, dan membatasi pertemuan besar. Pembatasan-pembatasan tersebut dikenal dengan istilah "great lockdown" yang salah satunya membuat kegiatan ekonomi global terhenti dan merugikan bisnis yang mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat, industri jasa terpuruk, aktivitas manufaktur menurun dan tidak terlepas pula dari berubahnya praktik politik di seluruh dunia.

Apa yang telah kita ketahui sekarang bahwa virus tersebut memiliki dampak yang sangat besar dan meluas, tidak hanya merugikan sisi kesehatan, tetapi juga terhadap sektor pembangunan-pembangunan yang di dalamnya termasuk ekonomi, Pendidikan, sosial dan kesejahteraan serta pula pada sektor politik dan pemerintahan di dunia. Indonesia tidak terlepas pula dari dampak besar Covid-19 ini.

Adapun dampak yang sudah diberikan oleh pandemik ini sangat banyak membawa perubahan-perubahan dalam sektor kehidupan manusia yang mengakibatkan beberapa hal harus dilakukan secara berbeda dari sebelumnya. Berbicara problematika praktik politik dari segi dunia kita bisa mendapatkan beberapa perubahan politik dunia dan kejadian-kejadian yang berpengaruh dalam kebijakan serta arah politik dunia.

Semua yang terjadi dalam problematika praktik politik bukan hanya dalam lingkup internasional melainkan juga problematika praktik politik yang ada di tingkat nasional atau domestik. Maka dari itu kita akan mengulas sebagian Problematika praktik politik dunia dan domestik/nasional yang terjadi di masa pandemi dengan bagian-bagiannya masing-masing.

Problematika praktik politik dunia dan nasional masa pandemi covid-19 akan kita ulas secara porsinya masing-masing dalam lingkup dunia internasional dan juga lingkup Nasional bernegara.

Problematika Praktik Politik Domestik di masa Pandemi

Sebelum ke lingkup internasional atau dunia kita perlu mengulas terlebih dahulu problematika praktik politik yang ada di lingkup nasional atau Negara Indonesia. Di Indonesia banyak problematika tentang praktik politik yang berdasarkan dari sistem politik yang ada yaitu pemilu ataupun kebijakan-kebijakan politik yang di ambil karena kondisi yang mendesak. Perubahan arah praktik politik ini dari segi pemilu yang sebenarnya terjadi secara lansung kemudian direncanakan untuk digitalisasi prosesnya. Adapun kerja sama antar negara dalam

konteks politik untuk mencari jalan keluar dari situasi pandemi covid-19 ini dengan berusaha menemukan dan menyediakan obat ataupun Vaksin untuk Covid-19 yang efektif menyembuhkan.

Berbicara problematika praktik politik di Indonesia pada masa pandemi ini kita tidak terlepas dari yang namanya kontestasi politik pada pemilu yang ada di Indonesia, pemilu sebelumnya yaitu adalah Pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah dan melibatkan sekitar 105 juta pemilih. Kampanye dijadwalkan pada 26 September sampai 5 Desember, dan masa tenang dimulai pada 6-8 Desember.

Saat terjadinya pilkada di masa pandemi pada waktu itu banyak menimbulkan perdebatan publik yang besar, perdebatan yang terjadi antara lain ialah tentang proses pemilihan tersebut yang dilakukan secara tatap muka atau secara digitalisasi. Hal ini banyak membawa perdebatan dari beberapa elemen masyarakat, ada yang setuju dilakukan tatap muka tetapi juga ada yang setuju untuk di digitalisasi tetapi juga ada yang berpikiran untuk di undur proses pemilihannya.

Yang menjadi perdebatan juga ialah Ketika pilkada dilakukan, pasar-pasar dibuka, tempat wisata dibuka tetapi Pendidikan ditutup dan rumah ibadah di minimalisir jamaahnya. Masih banyak lagi kebijakan yang bersangkutan dengan problematika praktik politik yang ada saat masa pandemi seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 pada saat itu, setelah terjadinya pengesahan yang dinilai kontroversi dari proses pengesahannya dan juga isi dari undang-

undangnyanya menimbulkan beberapa perdebatan yang kemudian terjadinya Demo rusuh yang pecah di berbagai kota di Indonesia. Demo-demo itu menyuarakan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selain dalam konteks demokrasi ada pula perubahan yang mencangkup anggaran, timbulnya perubahan anggaran dan bertambahnya kekuasaan eksekutif dalam penanganan Covid-19 membuat kuasanya akan anggaran pun ikut bertambah. Sejak terjadinya pandemi, pemerintah menjadi lebih aktif dalam pengeluaran anggaran negara untuk menangani ancaman Covid-19. Anggaran penanganan Covid-19 sebesar ratusan triliun dikeluarkan pemerintah sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020. Anggaran tersebut akan diberikan kepada sektor-sektor untuk menangani Covid-19, mulai dari sektor kesehatan sampai ekonomi serta dampak-dampak lain yang diakibatkan Covid-19, dikondisi ini pun masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup besar yaitu dengan terjadinya kasus penggelapan dana Bansos yang berjumlah milyaran rupiah oleh salah satu petinggi lembaga/kementerian sosial.

Problematika pun tidak hanya sampai disitu saja melainkan khususnya dari anggota dewan yang tidak berada di dalam koalisi pemerintah, yang sering menghambat kali ini tidak terjadi. Dengan demikian, memberikan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar, termasuk persoalan anggaran, kepada pemerintah esensial untuk dilakukan. Pola koalisi versus oposisi yang seperti biasa dipertontonkan saat kondisi normal tidak lagi dipraktekkan.

Di kondisi pandemi ini semua anak bangsa mengalami nasib yang sama akibat pandemi dan membuat rasa persatuan

semakin kuat. Begitu pula para elite partai yang merasa bahwa saat ini perbedaan-perbedaan politik marjinal harus dikesampingkan terlebih dahulu demi kepentingan bangsa dan negara yang jauh lebih besar walaupun masih ada beberapa problematika praktik politik yang bersebrangan.

Selepas dari kebijakan pemerintah dan dinamika yang ada disana dalam lingkup domestik, kebijakan pemerintah akan alur praktik politiknya yang menuai banyak problematika ini juga mencakup tentang hubungan luar negeri, Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Indonesia dipaksa untuk mulai menjalin kembali hubungan politik dengan berbagai negara lain. Hubungan diplomasi yang dibangun bertujuan untuk memaksimalkan hal penyelamatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri salah satunya dengan cara kerja sama dalam pencarian vaksin Covid-19. Adanya hubungan diplomasi Indonesia dengan negara luar seperti China maka akan menimbulkan ketidaknyamanan dengan Amerika Serikat karena berbeda kubu dalam hal politik serta kebijakan praktik politik.

Dengan ini bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya pandemi ini banyak membawa perubahan dari segi praktik politik, hal ini ditandakan dengan kejadian-kejadian politik yang terjadi. Dari segi intelektualis kita bisa menemukan beberapa problematika seperti beberapa kejadian yang sudah disebutkan dan dijelaskan tadi yaitu problematika pilkada karena dengan kebijakan tertentu dan juga arah-arrah politik yang berubah, hal ini menimbulkan paradigma dimasyarakat yang saling menyalahkan atas kejadian ini. ketidak konsistennya arah kebijakan pemerintah itu sendiri pun masih banyak problematika tetapi bukan berarti ini menjadi sepenuhnya salah

pemerintah melainkan ini semua tanggung jawab kita sebagai masyarakat dan juga individu yang bernegara.

Dengan fenomena-fenomena itu semua yang beralaskan kepentingan politik praktik maka kita bisa mengambil beberapa sudut pandang dari etika politik serta ketetapan dalam mengambil kebijakan untuk menangani problematika Pratik politik di masa pandemi ini. Kebijakan yang seharusnya di ambil saat situasi pandemi harus melingkup semua segi dan tidak berlandaskan kepentingan pribadi agar keutuhan dalam bernegara ini tetap terjaga walaupun berada dalam beberapa problematika praktik di lingkup politik negara.

Dari perubahan-perubahan situasi yang menimbulkan problematika praktik politik ini kita bisa mengambil beberapa nilai-nilai khusus atas fenomena ini. Nilai yang perlu kita tanamkan serta pahami yaitu nilai Pancasila yang harus lebih di pahami agar konteks kenegaraan tidak keluar dari jalurnya walaupun sedang berada di kondisi pandemi ini. Nilai lainya pun harus kita ambil dari beberapa sistem pilar yang ada seperti UUD 1945 dan juga Nilai Kemanusiaan agar kepentingan bersama lebih utama dibandingkan kepentingan pribadi dan dari sudut pandang yang berbeda kita perlu menekankan kesadaran bahwa dimana pun dan kondisi apapun kita perlu berlaku bijak dengan dasar kemanusiaan walaupun dalam lingkup politik yang sangat luas agar problematika praktik politik ini dapat menemukan jalan keluarnya dan berakhir dengan keinginan Bersama untuk keluar dari situasi pandemi ini.

Rekontruksi pemulihan pembangunan di semua bidang domestik pun diperlukan, penataan yang seharusnya pada tempatnya harus dikembalikan sesuai dengan ketetapan yang ada. Pandemi memang mengubah semuanya tetapi walaupun

terjadi perubahan-perubahan sistem tetaplah di jalankan sesuai dengan konsepnya agar problematika praktik politik terselesaikan sesuai dengan jalannya.

Problematika Praktik Politik Dunia di Masa Pandemi

Pandemi ini bukan hanya merubah semua lingkup praktik politik nasional melainkan juga merubah dan menyebabkan beberapa problematika di dunia internasional. Dengan adanya pandemi dunia bukan hanya diguncangkan dari segi Kesehatan melainkan juga problematika praktik politiknya. Setelah kita membahas problematika politik praktik di dalam negara kita perlu juga mengulas sebagian problematika yang ada di dunia ini.

Dari pertama Covid 19 muncul di Wuhan China dan kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia dengan keganasannya banyak negara-negara yang memperdebatkan dan memperlmasalahakan tentang asal muasal covid 19 ini. investigasi tentang asal usul virus corona penyebab Covid-19 yang dilakukan tim gabungan WHO-China membuahkan hasil. Namun, temuan asal usul virus corona penyebab Covid-19 tersebut masih berupa sejumlah kemungkinan.

Sebuah studi gabungan WHO-China yang menyelidiki tentang asal-usul virus corona Covid-19 mengatakan bahwa penularan virus dari kelelawar ke manusia melalui hewan lain adalah skenario yang paling mungkin. Hal itu terungkap dalam sebuah salinan draf yang diperoleh oleh The Associated Press.^[1]

Adapun juga klaim tentang awal mula wabah Covid-19 di Wuhan diklaim berasal dari makanan beku impor usai India, Amerika Serikat, dan Eropa, kini China mengklaim Corona berasal dari jejak Covid-19 di makanan beku impor yang masuk

ke Wuhan, China, termasuk dari Australia. Selama ini, kasus COVID-19 pertama diyakini muncul di pasar basah Wuhan^[2] Dan masih banyak lagi klaim-klaim dari beberapa pihak terkait awal mula Covid-19 ini.

Di luar dari perdebatan asal muasal covid 19 ini dengan melihat perbedaan pendapat dari setiap negara yang berbeda maka problematika praktik politik pun mencuat. Dari China dan Amerika yang saling Tuding penyebab bencana pandemi ini dan juga penanganan yang masih banyak kontroversi di kancah internasional.

Pada awal 2020 ini diperlihatkan dengan adanya dan meluasnya penyebaran wabah penyakit yang disebabkan infeksi virus Corona jenis SARS CoV-2 yang dikenal sebagai Covid-19, yang sangat cepat menyebar dan ganas dampaknya. Perkembangan telah memperlihatkan perluasan kontaminasi Covid-19 ke 210 negara, dari semula ke beberapa negara di Asia dan Eropa, menjangkau negara dan tempat lain yang belum pernah disebut terkena wabah selama ini.

Dalam situasi yang tidak pasti pada waktu itu ada pergulatan politik di kanca internasional dan problematika itu berasal dari Presiden AS pada saat masih Donald Trump yang menjabat sebagai presiden sebelum digantikan oleh Joe Biden. Trump pada waktu itu mengumumkan keputusan menghentikan kontribusi finansial negaranya kepada WHO, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus masalah kesehatan dunia, khususnya terkait penyebaran wabah Covid-19. Keputusan presiden negara dunia yang mengejutkan itu mengikuti berbagai keputusan dan kebijakan kontroversial AS lainnya sebelum ini, yang telah banyak mengundang kecaman para pemimpin dunia. AS kepada WHO menjadi penting,

terutama terhadap penjelasan atas latar belakang dan penyebab mengapa ia membuat keputusan tersebut. [3]

Tidak mengherankan, sejak awal, ia menyampaikan Covid-19 kepada pers internasional sebagai “Chinese virus”, tudingan yang berbau rasis. Selanjutnya, ketika virus mulai melanda New York, ia menentang peringatan Gubernur Cuomo yang mengingatkan agar pemimpin nomor satu AS itu memberikan perhatian yang serius dan segera menyiapkan respons darurat yang dibutuhkan agar tidak menimbulkan dampak hebat. Gedung Putih, Trump masih terbawa penampilan dan kinerjanya sebagai pebisnis daripada sebagai pemimpin politik dari sebuah bangsa yang besar.

Berbeda dengan Presiden Trump, Presiden Rusia Putin dan Menlu, Merkel, dan Presiden Macron dari Perancis, sepakat bahwa kinerja WHO harus di evaluasi dan diperbaiki, agar jangan sampai dunia tidak siap, kewalahan dan tidak berdaya lagi menghadapi berbagai ancaman pandemik di masa depan. AS kepada WHO memberikan sebesar 400-500 juta dolar AS setiap tahun itu sangat signifikan artinya dalam memerangi berbagai ancaman pandemik di seluruh dunia.

Walaupun AS memang tidak bisa mencegah masuknya atau ada nya penyebaran virus Covid-19 ini, tetapi ini bisa menjadi one cover kepada jumlah kalangan rakyat. Bantuan lainnya yaitu dengan adanya pelindung untuk diri dengan contoh, masker, *handsanitizer*, dll juga mengirimkan beberapa sektor dalam bidang kesehatan yaitu dokter dan perawat juga paramedis nya untuk penanganan semakin kuat juga untuk mencari dukungan bagi realisasi ambisi internasionalnya. Dan yang lebih merendahkan cara berkerjanya ialah kinerja luar negeri AS adalah permohonan presiden trump tanpa malu

kepada cina, padahal sebelumnya trump sudah merendahkan china dengan menyebut bahwa semua awal mula adanya virus covid 19 ini berawal dari China yang di anggap bisa menjadi acuan problematika dalam negara china. Dan ini yg menyebabkan turunnya martabat korektor AS dan meluas nya tingkat korektor china.

Dari hal diatas kita menemukan beberapa problematika praktik politik di kancah internasional yang harus ditemukan titik terangnya. Kerja sama antar negara diperlukan dalam menangani Covid 19 ini, dari kelompok negara berkembang, termasuk Indonesia melakukan gerakan secara intensif yang disebut dengan Gerakan Organisasi Non-Blok karena merupakan pilihan yang strategis dan paling tepat. Dengan bersikap tidak memihak pada salah satu kubu akan lebih mudah bagi kelompok negara berkembang untuk mendapatkan dukungan dari kubu barat (Amerika Serikat dan sekutunya), sekaligus mendapatkan manfaat dari kubu timur (Cina dan sekutunya). Terlebih dalam pandemi ini semakin mengukuhkan bahwa global health menjadi satu instrumen politik, karena kondisi ini juga membuat pemetaan negara dengan model kapital kuat dan berkembang menjadi lebih jelas dengan indikator kapasitas kesehatan publik yang dimiliki oleh negara itu sendiri.

Melihat secara keseluruhan dari tingkat nasional sampai dengan internasional kita mendapatkan beberapa point besar yang di antaranya ialah perubahan arah politik serta kebijakannya di tingkat nasional ataupun tingkat internasional, perubahan-perubahan ini membuat beberapa kebiasaan yang berbeda dari segala lingkup kehidupan.

Problematika praktik politik pun masih tanda tanya untuk penyelesaiannya dari awal mula covid-19 berada serta juga penanganan dari pandemi ini yang belum sampai pada titik terangnya, pandemi ini sudah banyak membuat perubahan yang semestinya bukan pada tempatnya namun kita bisa simpulkan dengan perubahan-perubahan serta perbedaan-perbedaan penanganan ataupun penanggapan perihal arah praktik politik yang ada di dunia semasa pandemi ini kita di tekan kan dengan kesadaran bahwa dunia sedang masuk ke masa kritis akan Kesehatan dan kesadaran dalam bermanusia politik.

Hal-hal ini harus ditekankan kesedarannya melalui semua nilai kehidupan yang ada agar semua penyelesaiannya tercapai dengan semestinya dan pula semua yang telah terjadi di masa pandemi ini selesai dengan penyelesaiannya masing-masing, terutama problematika praktik dunia politik Kembali ke sistem yang sebenarnya dengan tidak adanya kesenggangan antarnegara yang mengakibatkan kedamaian di dunia terganggu.

□

Problematic Pandemi Covid-19, Mahasiswa Bisa Apa?

Muhamad Sulaiman, BEM FISIP UMJ

Mendengar kata covid-19, mayoritas pastinya akan menjawab bahwa covid meninggalkan sejumlah persoalan problematik, baik itu dalam aspek privat ataupun public. Hal itu jika ingin ditelusuri memang betul, karena apa? masyarakat dalam kondisi hari ini masih gagap dalam menghadapi sekelumit persoalan yang dihasilkan termasuk mahasiswa. Mahasiswa dalam istilah sederhana adalah mereka yang sedang melakukan studi tingkat lanjut di perguruan tinggi, mahasiswa identik dengan nalar berpikir kritis, dan solutif terhadap suatu persoalan.

Namun realitasnya, mahasiswa pun gagap dalam menghadapi situasi pandemi saat ini, contoh sederhananya adalah perubahan paradigma dalam proses pembelajaran, sebelum pandemic metode konvensional tatap muka dianggap efektif karena presentase penyerapan hasil pembelajaran dapat mencapai kategorisasi yang cukup ideal, namun semenjak pandemi proses pembelajaran yang dijalankan secara online dianggap menurunkan kualitas kapasitas mahasiswa.

Padahal di era insdustrialisasi berbasis teknologi yang kerap disebut sebagai era 4.0 diharapkan masyarakat khususnya mahasiswa terbiasa dengan penggunaan teknologi digital dan mampu untuk menopang produktivitas suatu kegiatan. Pandemi oleh sebagian masyarakat memang dipandang sumber dari munculnya beragam masalah, mulai dari sosial, ekonomi,

pendidikan, kesehatan dan banyak hal lain. Namun disisi lain pandemi ini membuka mata bagi sebagian orang bahwa Indonesia masih “gagap” dan perlu terus didorong untuk melek terhadap sumber informasi berbasis digital utamanya terhadap pengelolaan data, karena ini yang sejauh ini menimbulkan polemik.

Secara realitas seyogianya karena mengemban misi *agent of change* mahasiswa diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perubahan paradigma yang saat ini tengah terjadi di masyarakat global, mahasiswa perlu menjadi inisiator ditengah masyarakat didalam mendorong masyarakat untuk melek terhadap penggunaan teknologi didalam mengupayakan memajukan negara. Karena dimasa mendatang, sudah dipastikan bahwa pergeseran paradigma dari konvensional keranah digital semakin dahsyat akan terjadi. Saat ini pun sudah cukup dahsyat terasa, pekerjaan yang di masa lampau masih dapat dilakukan untuk sekarang ini sudah tergantikan dengan adanya teknologi. Tentu hal ini perlu terus diupayakan agar masyarakat kita tidak “Gaptek” yaitu gagap teknologi.

Katalisator Digitalisasi

Tentu aspek ini merupakan tantangan bagi mahasiswa sebab bekal yang mereka miliki sebagai kaum intelektual, kaum pembawa perubahan dan kritis dalam berbagai persoalan sudah seyogyanya persoalan digitalisasi ini harus menjadi konsern mahasiswa didalam mendorong masyarakat dan pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi sebagai dasar atau pijakan didalam mengambil suatu kebijakan.

Contohnya pada saat pandemi sekarang ini, penghimpunan data berbasis teknologi masih kurang optimal

dilakukan oleh pemerintah, dampaknya apa? Penanganan yang harusnya dapat dilakukan dalam waktu singkat menjadi molor sebab apa? Data yang dipegang oleh pemerintah selama ini masih diragukan validitasnya, seperti angka peningkatan kasus per hari, jumlah masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dan seterusnya. Serta terjadinya penyelewangan bantuan social oleh Menteri social dan kroni merupakan sebab akibat, tidak rapuhnya manajerial data kemensos didalam menyalurkan bantuan tersebut sehingga celah tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk dimanipulatif dan akhirnya korupsi.

Implementasi Tridharma

Tridharma merupakan cakupan ataupun amanah yang harus diemban dan dijalani oleh mahasiswa untuk purna dapat disebut sebagai kaum cendikiawan perubah tatanan sosial, sebab didalam tridharma berisi poin; (1) Pendidikan dan pengajaran; (2) Penelitian dan pengembangan; (3) Pengabdian Masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan dapat dijalankan oleh mahasiswa untuk dapat membantu pemerintah didalam mengentaskan persoalan krisis pandemi saat ini dan ketiga hal tersebut sejauh ini masih dapat dijalankan oleh mahasiswa terutama semenjak pemerintah mengeluarkan program MBKM ketiga aspek tersebut menjadi titik fokus di dalam mendorong peningkatan mutu oleh mahasiswa. Mahasiswa juga dapat proaktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang percepatan vaksinasi, dan hal-hal lain yang mendukung percepatan vaksinasi.

Control of Social

Pandemi bukan halangan bagi mahasiswa untuk melakukan aktivitas sosialnya, apalagi semenjak awal pandemi hingga saat ini sejumlah aturan dan kebijakan dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mereka menangani persoalan pandemic saat ini. Kebijakan mulai dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro Darurat, dan PPKM level 1-4. Kebijakan pemerintah itupun banyak dinilai tidak tegas dan terkesan lamban oleh karena itu mahasiswa massif mengepresikan kekesalannya melalui narasi argumentatif terkait hal tersebut. Hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa sebagai mitra kritis terhadap pemerintah.

Resonansi sosial yang dimiliki oleh mahasiswa tidak terhalang suatu kondisi termasuk pandemi, sejumlah kasus disorot tajam oleh mahasiswa yaitu; (1) Pengesahan RUU Ciptaker (Omnibuslaw); (2) RUU KPK; (3) RUU Minerba. Dari ketiga aturan tersebut dinilai oleh masyarakat sebagai “Pelindung” atas tindakan merugikan mereka terhadap aspek keadilan social bagi masyarakat Indonesia. Karena ketiga aspek tersebut, mahasiswa beberapa waktu lalu banyak yang melakukan aksi turun kejalan untuk menentang pemberlakuan kebijakan tidak adil tersebut.

Jadi, mengenai peran, fungsi, serta posisi mahasiswa ketika berbicara apa yang dapat mereka lakukan disaat situasi krisis seperti saat ini, kesemua hal itu telah terangkum dalam potret narasi diatas. Terakhir, istilah pergerakan mahasiswa juga tidak boleh disempit artikan hanya kepada persoalan demonstrasi atau unjuk rasa saja, namun ditengah situasi sulit saat ini mahasiswa harus mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. []

Strategi Komunikasi dalam Menghadapi Krisis Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Mahasiswa tentang Covid-19

Arief Mardiansyah, HIMAKOM FISIP UMJ

Kasus Covid-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma dan Amigos, Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja, tetapi juga multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia ini, didapat melalui penelusuran Kementerian Kesehatan RI. “Orang Jepang ke Indonesia bertemu siapa, ditelusuri dan ketemu. Ternyata, orang yang terkena virus corona berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun,” kata Jokowi.

Penanganan kasus pertama virus corona Wuhan tak hanya berfokus pada kedua pengidap. Demi penularan lebih jauh, pemerintah juga mengisolasi rumah pengidap Covid-19 di kota Depok. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, rumah warga Depok yang positif mengidap virus corona telah diisolasi, “Sesuai prosedur, Dinas Kesehatan (DINKES) setempat langsung melakukan pemantauan juga melakukan isolasi rumah dan sebagainya,” jelasnya.

Covid-19 bukanlah penyakit global pertama kali yang dihadapi Indonesia. Jauh sebelumnya, tepat pada tahun 2003 pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan dengan penyakit

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah Indonesia memiliki kesiapan dan perlengkapan yang memadai untuk menangani kasus virus corona pertama ini. Tak cuma itu, pemerintah juga berupaya untuk menekan penyebaran virus corona Wuhan, yang kini vaksinnya belum ditemui. Menurut Jokowi, kini pemerintah telah menyiapkan lebih dari 100 rumah sakit dengan ruang isolasi untuk menangani Covid-19.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga memiliki peralatan medis yang memadai sesuai standar internasional. Selain tim medis, Jokowi juga membentuk tim lain untuk mengatasi virus corona Wuhan. Tim ini merupakan gabungan dari TNI-Polri serta sipil untuk melakukan penanganan di Lapangan. Singkat kata, pemerintah siap dan menjamin ketersediaan anggaran mengatasi serangan Virus Corona. Mulai dari pengobatan, penanganan dan pencegahan agar tidak menyebar.

Strategi Komunikasi dalam Menghadapi Krisis Organisasi

Kesalahan umum yang paling sering dilakukan oleh pimpinan organisasi yang tidak siap menghadapi krisis adalah dalam bidang komunikasi. Bentuk kesalahan yang dilakukan misalnya, melakukan penolakan telah terjadi krisis, berbohong, spekulasi dan menolak untuk memberi informasi yang jujur dan komplit. Menurut Fearn-Banks, Haggart, Stubbart yang dikutip Ngurah Putra (1990) komunikasi pada saat organisasi menghadapi krisis menjadi sangat penting disebabkan antara lain karena krisis dicirikan oleh adanya ketidakpastian (uncertainty), konflik kepentingan (conflict of interest), kompleksitas dan keterlibatan emosional. Pada saat sebuah krisis terjadi,

kebutuhan akan sebuah informasi biasanya begitu tinggi. Informasi yang cepat dan tepat akan mengurangi ketidakpastian.

Mengenai pentingnya komunikasi dalam penanganan krisis juga terungkap dari sebuah studi yang dilakukan Pinsdorf (Putra, 1999) yang membandingkan pengelolaan krisis yang terjadi pada perusahaan penerbangan nasional Jepang Japan Airlines yang mengalami kecelakaan pada tahun 1985, dan pengelolaan krisis oleh Pan Am, sebuah perusahaan Amerika yang mengalami kecelakaan pada tahun 1988. Dari berbagai respon dan reaksi kedua perusahaan tersebut, secara garis besar dalam penanganan krisis ada dua tindakan khas yang menjadi tuntutan yaitu: 1. **Tindakan-tindakan yang bercirikan keterlibatan manajemen** langsung dalam merespon krisis, yaitu segi apa yang harus dilakukan organisasi pada saat krisis dan 2. **Tindakan komunikasi**, yakni apa yang harus dikatakan oleh organisasi yang sedang menghadapi krisis. Dalam merespon krisis, pemenuhan akan informasi yang terkontrol dengan baik dan informasi yang cepat dan tepat merupakan prioritas utama. Kekurangan-kekurangan dalam komunikasi krisis justru dapat menyebabkan semakin terpuruknya sebuah organisasi yang sedang menghadapi krisis.

Komunikasi selama krisis menurut Sturges dkk (Ngurah Putra, 1999) mempunyai dua fungsi dasar, yaitu 1. Untuk menetralkan intervensi pihak ketiga yang mungkin dapat memperparah krisis yang sedang dihadapi oleh sebuah organisasi dan 2. Untuk menjaga agar karyawan dapat tetap memperoleh informasi yang tepat tentang organisasi tempat mereka bekerja, sehingga mereka menjadi tim yang memperkuat posisi organisasi dalam menghadapi krisis. Intervensi pihak ketiga umumnya datang dari media massa yang punya prinsip

untuk menyampaikan setiap realitas sosial kepada khalayak, termasuk krisis yang sedang dialami sebuah organisasi.

Keberhasilan komunikasi krisis tergantung dari program komunikasi yang dibuat oleh sebuah organisasi dalam menghadapi krisis, Program komunikasi perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti khalayak atau publik suatu organisasi, tujuan kegiatan komunikasi untuk masing-masing publik, pesan yang akan disampaikan, media komunikasi yang akan digunakan, bentuk informasi, pelaku komunikasi, juru bicara dan sumber komunikasi krisis serta dukungan pihak luar dalam penguatan organisasi.

Melaksanakan strategi komunikasi dalam menangani krisis organisasi adalah hal yang penting dilakukan, terutama ketika organisasi itu ingin segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Krisis organisasi bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bisa karena faktor internal maupun faktor eksternal yang ada. Faktor internal seperti misalnya kerjasama di antara tim, pola manajemen, sistem birokrasi dan lain sebagainya. Sementara faktor eksternal bisa karena hubungan kerjasama dengan organisasi lain yang kurang baik atau adanya ancaman dari luar organisasi itu sendiri.

Manakala sebuah organisasi mengalami krisis seperti demikian, maka diperlukan langkah-langkah yang tepat dan baik untuk memecahkan permasalahan tersebut. Beberapa macam langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh organisasi untuk mempercepat penyelesaian krisis tadi dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat. Pendekatan komunikasi diperlukan sebab melalui proses inilah permasalahan lebih efektif dan cepat untuk diselesaikan.

Pengaruh Strategi Komunikasi Terhadap Mahasiswa tentang Covid-19

Perkuliahan daring di masa pandemi Covid-19 membuat mahasiswa harus melakukan adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang baru. Pembelajaran daring harus tetap mengandung aspek-aspek pendidikan dan dijalankan dengan baik tanpa mengurangi mutu dan kualitas pendidikan yang dianut oleh tiap universitas. Menurut teori Wisman (2017), hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu komunikasi pendidikan adalah mengenali sasaran komunikasi, pemilihan media yang tepat, mengkaji tujuan, daya tarik dan kredibilitas. Sasaran komunikasi dalam komunikasi pendidikan yang dilakukan oleh para dosen ini adalah mahasiswa/i yang menjadi peserta didik.

Media yang sering digunakan untuk pelaksanaan perkuliahan daring secara tatap muka virtual selama pandemi Covid-19 adalah Zoom Meetings. Selain itu perkuliahan daring juga dibantu dengan media lain seperti Google Form, Google Classroom, Whatsapp dan bahkan media sosial yang biasanya dipergunakan untuk mengumpulkan suatu tugas dan ujian. Media ini dapat langsung diakses dengan mudah oleh para dosen dan mahasiswa agar mereka dapat saling berkomunikasi dan terhubung satu sama lain.

Agar pesan dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh penerima pesan (komunikan), diperlukan sebuah strategi komunikasi. Sebagaimana disampaikan Wedananta (2016) strategi komunikasi memiliki tujuan untuk menyederhanakan dan memparafrasekan penjelasan-penjelasan untuk menghindari kesulitan pemahaman oleh target pendengar. Kalo menurut Wijaya (2015:59) juga menyampaikan strategi komunikasi dapat

merancang program secara komprehensif, logis, menyeluruh, realistis dan integrative. Strategi komunikasi yang dilakukan dosen juga bertujuan untuk menyederhanakan pembelajaran kearah yang lebih logis, menyeluruh, realistis, intergratif dan komprehensif sehingga mahasiswa dapat mencapai pemahaman yang baik walaupun hanya belajar dari rumah lewat medianya masing-masing.

Strategi komunikasi menurut Effendy dapat menyebarkan pesan yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif dengan cara sistematis serta dapat membantu mengemas informasi sehingga dapat dikomunikasikan kepada pendengar dan diterima dengan baik (Nurrohman, 2015). Strategi komunikasi yang dilakukan oleh dosen dalam proses belajar mengajar secara daring ini dibuat agar pesan atau materi yang disampaikan oleh dosen dapat dikemas sedemikian rupa sehingga pemahaman mahasiswa terhadap materi lebih baik.

Pandemi Covid-19 membawa perubahan yang besar dalam sektor pendidikan, pembatasan jarak untuk menekan penyebarluasan virus ini menjadi alasan bagi universitas dan sekolah tinggi untuk mengadakan perkuliahan daring. Oleh karena itu dalam mengajar secara pandemi Covid-19 mahasiswa sudah seharusnya mendengarkan materi apa yang disampaikan oleh dosennya, karena Covid-19 ini bukan lagi jadi kendala untuk mencari ilmu setinggi mungkin. []

BAB II:
PARIWISATA,
BUDAYA, DAN
OLAHRAGA



Covid-19 pada Sektor Pariwisata

Ennike Rahayu, HIMIA

Sejak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 tepatnya pada bulan maret lalu berbagai peraturan dan regulasi dijalankan oleh pemerintah salah satunya yakni penerapan PSBB, 3M, dan sebagainya. Semua tempat hiburan ditutup dan hanya menyisahkan beberapa sector saja yang masih diperbolehkan dibuka seperti *market*, apotik, rumah sakit, dan sebagainya. Masyarakat diimbau untuk beribadah di rumah dan tidak berkeliaran ke banyak tempat ataupun berkerumunan demi menekan jumlah penyebaran. Virus covid-19 memang tidak berbahaya pada orang yang sehat namun akan tetapi virus ini akan dapat sangat mematikan apabila terkena pada masyarakat yang mempunyai penyakit bawaan dan lansia, penyebarannya yang cepat sekali pun menjadikan virus ini menakutkan.

Akibat dari virus covid-19 mengakibatkan semua sector mengalami dampak hingga terancam, karyawan banyak yang di phk hingga usaha yang banyak bangkrut menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Salah satu sector yang paling berdampak akibat Covid-19 adalah sector pariwisata, sector pariwisata menjadi sector yang paling berdampak hingga menyebabkan dikhawatirkannya belasan juta masyarakat akan kehilangan pekerjaan¹ padahal tak dapat dimungkiri bahwa

¹ <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/12/dampak-covid-19-di-sektor-pariwisata-hingga-akhir-2020-15-juta-orang-terancam-kehilangan-pekerjaan>

sector pariwisata menjadi salah satu sector yang memberi kontribusi besar terhadap anggaran pendapatan negara hingga pandemic datang melanda, pejabat-pejabat dibuat pusing olehnya belum lagi dengan tuntutan dari masyarakat. Namun selaku dari pemimpin negeri sudah sewajarnya harus dapat mengedepankan kesejahteraan dari masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus dengan tegas dan cepat dalam menyikapi permasalahan yang melanda terutama pada sector ini.

Tak hanya pada tempat wisata, namun tetapi juga pada pengusaha-pengusaha kerajinan, minat beli masyarakat terhadap barang-barang aksesoris mulai berkurang kemudian salah satu akibat dari adanya pandemic Covid-19 adalah daya beli masyarakat yang kurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hingga mengakibatkan susah untuk tercapai pertumbuhan ekonomi 5% pada 2021. Daya beli masyarakat yang rendah juga dipengaruhi oleh semakin sedikitnya lapangan pekerjaan dan maraknya PHK. Menurut data Badan Pusat Statistik kunjungan turis nonlokal ke Indonesia per Januari hingga November 2020 tercapai sekitar 3,89 juta jiwa kunjungan, lebih rendah apabila dibandingkan di bulan yang sama pada tahun lalu. Jumlah ini mengalami pengurangan sekitar 73,60%.

Salah satu penyebab terhambatnya adalah lambannya proses vaksinasi terhadap masyarakat Indonesia, proses lambannya vaksinasi juga menjadi faktor penentu terutama pada pertumbuhan ekonomi yang diprediksi akan susah tercapai lima persen pada tahun 2021. Dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak hingga lebih dari dua ratus jiwa menyebabkan munculnya berbagai pertimbangan terutama juga pada sector Pendidikan, hampir satu tahun siswa, guru, dan mahasiswa

melaksanakan pembelajaran daring secara online. Metode belajar ini dinilai kurang efektif berdasarkan dari respon dari beberapa teman-teman mahasiswa dan siswa karena mahasiswa dan siswa tidak dapat berinteraksi langsung dan berdiskusi langsung selama pembelajaran. Di sektor ekonomi mulai mengalami sedikit pertumbuhan namun tentu belum dapat mencapai target sebelum ada covid-19.

Adapun Langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah demi menyelamatkan sektor pariwisata dari kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkarekraf) antara lain adalah; menyiapkan destinasi, membangun infrastruktur dan koneksi dengan negara lain, penerapan dan koordinasi terhadap protokol CHSE di daerah, mengkampanyekan eksistensi dari destinasi, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kuantitas dan kualitas. Juga Adapun Langkah lainnya yakni memberikan dana hibah pada sector pariwisata.

Dampak dari pandemi Covid-19 memang tidak dapat dihindarkan, berbagai instansi, kelompok maupun individu harus dapat turut berpikir dan bertindak cepat dalam menghadapi dan menemukan solusi yang tepat dalam menangani covid-19 serta aparaturnya yang harus sigap dan baik dalam memberikan sosialisasi hingga dapat terdengar oleh masyarakat karena masih ada saja masyarakat yang tetap melanggar aturan 3M ataupun 5M.

Adapun yang dapat penulis sampaikan mengenai solusi dari permasalahan ini adalah lebih kepada pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia adalah negara tropis, negara kepulauan dengan aneka ragam tumbuhan serta hewan dan didukung oleh tanah yang subur diharapkannya

pemerintah dapat lebih memanfaatkan sector sumber daya alam dalam menyongsong pertumbuhan ekonomi di negara. Lebih kepada penekanan Ekspor dan mendukung penuh pada produksi produk-produk local yang mana tentu akan sangat berdampak bukan hanya pada pendapatan negara tapi juga pada sector ketenagakerjaan, karena semakin terbukanya luas lapangan pekerjaan di tanah air.

Adapun yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah turut serta dalam mengkampanyekan produk dalam negeri dan mengenalkan produk tersebut ke berbagai masyarakat dengan membeli produknya. Atapun turut serta membuat *event* Kerjasama terhadap produk-produk lokal seperti acara seminar, *workshop*, dan sebagainya. []

Melestarikan dan Mempertahankan Budaya Seni Tari di Masa Pandemi

Adrika Febriany Putri, SAFIMTA

Seni tari di Indonesia sangatlah beragam. Keberagaman seni tari ini dimulai dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman seni tari ini menjadi identitas atau ciri khas masing-masing daerah yang pastinya perlu dilestarikan oleh generasi mendatang. Berbagai tarian ini sering kali kita lihat dipentaskan dalam acara-acara, seperti upacara adat penyambutan tamu kehormatan, upacara adat pernikahan, perlombaan, dan sebagainya. Tarian ini dilakukan secara tunggal, berpasangan, berkelompok, atau kolosal.

Sebelumnya apa sih seni tari itu? Mari simak penjelasan berikut. Seni tari adalah suatu kesenian dengan media ungkap berupa gerakan. Seni tari terbentuk sebagai ungkapan jiwa manusia melalui ekspresi melalui gerakan ritmis dan estetis. Selain kesenian, dalam perkembangannya, seni tari juga menjadi bagian dari kebudayaan. Berdasarkan kutipan dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tari merupakan salah satu bentuk kesenian yang mempunyai media ungkap atau substansi gerak melalui gerakan manusia.

Gerak yang dimaksud bukanlah gerakan realistik atau keseharian, melainkan gerakan dalam wujud ekspresif. Gerak ekspresif yang dimaksud adalah gerakan indah yang bisa

memengaruhi perasaan manusia. Keindahan gerakan tersebut merupakan gerakan distilir yang mengandung ritme tertentu. Gerakan indah ini tidak hanya gerakan lembut dan halus, melainkan juga gerakan keras, kasar, kuat, atau penuh tekanan yang bisa dikategorikan sebagai gerakan indah. Dalam melestarikan seni tari, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta membuat suatu Lembaga Kemahasiswaan yang biasa disebut Safimta. Safimta ini terdiri dari tari saman dan tari tradisional. Di Safimta inilah para mahasiswa sebagai penerus bangsa generasi mendatang akan melestarikan budaya tari Indonesia.

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona atau Covid-19 ini pada awal Maret 2020. Saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya kasus 1 dan kasus 2 Covid-19 yang teridentifikasi pada seorang perempuan berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Presiden Jokowi mengatakan, kasus 1 terinfeksi virus corona dari warga negara Jepang yang sempat melakukan perjalanan ke Indonesia. Kasus 1 kemudian menularkan virus itu kepada ibunya, kasus 2. Pandemi Covid-19 ini memberi dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dimulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun kesenian seperti halnya kegiatan Safimta ini.

Dalam mencegah atau meminimalisir penularan Covid-19 ini, kegiatan yang berpotensi mempertemukan banyak orang dalam satu waktu yang sama kini dibatasi dan diminta untuk tidak berpergian keluar rumah hanya di rumah saja. Kegiatan-kegiatan yang dibatasi yaitu, bersekolah, bekerja di kantor atau pabrik, menonton film di bioskop, ataupun menghadiri konser. Pandemi Covid-19 terhadap dunia kesenian ini, khususnya

kesenian tari saman dan tradisional sangat berdampak. Seperti halnya, susah untuk keluar rumah yang mengakibatkan latihan narinya tidak akan maksimal. Selain itu juga acara-acara Safimta lainnya yang bertujuan untuk saling mengenal anggota-anggotanya satu sama lain yang berdampak anggota-anggotanya kurang mengenal satu sama lain karena pandemi Covid-19.

Penyesuaian yang harus dilakukan oleh pelaku seni adalah tetap melaksanakan latihan, misalnya, seminggu sekali. Di tempat latihan tersebut juga harus bersih dan disediakan hand sanitizer. Para pelaku seni juga diwajibkan memakai masker dan minum vitamin sebelum berangkat latihan. Menerapkan prinsip hidup sehat dengan memakan makanan yang bergizi, bernutrisi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Selain itu, para pelaku seni diwajibkan jaga jarak tidak terlalu berdekatan atau kontak dekat dengan anggota atau pelaku seni lainnya. Hal ini juga bisa dilakukan dalam inovasi agar dunia seni bisa tetap eksis di masa pandemi.

Gambaran dunia seni pada masa *new normal* nanti. Pergelaran seni dan budaya pada masa pandemi Covid-19 dalam dunia seni pada *new normal*, bukan berarti harus berhenti. Setiap kegiatan seni dan budaya dalam dunia seni harus tetap bisa berjalan, asalkan memenuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan Gugus Tugas Covid-19. Karena itu, pertunjukan seni dan budaya ini harus melakukan inovasi dan mengubah metode pertunjukan.

"Menurut saya, dan berdasarkan penjabaran dari undang-undang tentang karantina kesehatan, permenkes, PSBB, PSBM. Selama itu mengikuti protokol kesehatan dan diyakini oleh Gugus Tugas Covid-19, pertunjukan seni dan budaya di masa pandemi ini bisa tetap dijalankan. Tentunya ada pembatasan

waktu dan jumlah orang yang mengikuti," jelas Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, ketika membuka Workshop Protokol Kegiatan Seni di Masa Pandemi Covid-19, yang digelar di Hotel Horison Tasikmalaya, Senin, 12 Oktober 2020. "Ke depannya bisa jadi, protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak, bakal menjadi budaya. Bukan hanya nasional, tetapi budaya dunia," ujar Ferdiansyah.

Sementara itu, budayawan sekaligus Ketua Dewan Kesenian Tasikmalaya, Bode Riswandi mengatakan, masa pandemi Covid-19 memang saat berdampak pada semua sektor, termasuk sektor kesenian. Terutama yang menggantungkan hidupnya pada kesenian dan banyak yang terpukul. Oleh karena itu, diusahakan tetap melaksanakan latihan, namun tidak setiap hari seperti seminggu sekali.

Di tempat latihan tersebut juga harus bersih dan disediakan *hand sanitizer*. Para pelaku seni juga diwajibkan memakai masker dan minum vitamin sebelum berangkat latihan dan menerapkan prinsip hidup sehat. Dengan memakan makanan yang bergizi, bernutrisi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Selain itu juga para pelaku seni diwajibkan jaga jarak tidak terlalu berdekatan atau kontak dekat dengan anggota atau pelaku seni lainnya. []

Sepak Bola dan Futsal dalam Adaptasi Kebiasaan Baru

Muhammad Febrian Ali, HWFC

Sudah satu tahun lebih pandemi Covid-19 telah merambak ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Hingga kini Indonesia merupakan negara yang masih banyak jumlah kasus aktif. Sesuai dengan arahan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 setiap orang diharuskan menerapkan protokol kesehatan 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (*Corona Virus Disease*). Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir 2019 memberikan dampak yang cukup besar terhadap Indonesia di berbagai bidang.

Mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial hingga bidang olahraga khususnya sepak bola dan futsal. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini membuat para pemerintah di berbagai negara harus memutar otak dengan membuat berbagai macam kebijakan guna menekankan angka penyebaran Covid-19 dengan harus memperhatikan perputaran ekonomi di dalam negara tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dibuat berdampak pada ditundanya kompetisi-kompetisi olahraga terkhusus sepak bola dan futsal karena dalam kegiatan tersebut mengharuskan berkumpulnya orang banyak dan dipastikan melanggar protokol kesehatan.

Sepak bola dan futsal sendiri merupakan olahraga yang paling banyak digemari diseluruh penjuru dunia, cabang

olahraga yang dimainkan dengan cara merebutkan sebuah bola untuk dimasukkan ke dalam gawang dengan dua tim saling barlawanan ini merupakan bisnis yang sangat besar pada era sekarang ini. Olahraga ini juga merupakan yang paling dicari oleh para pebisnis untuk menjadi rekan kerjasama sebuah klub sepak bola maupun futsal. Karena ketika sebuah perusahaan menjadi sponsor bagi sebuah klub besar merupakan bisnis yang sangat besar dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kompetisi sepak bola dan futsal sendiri biasanya juga menjadi peluang bisnis bagi stasiun televisi untuk menjadi pemilik hak siar dari sebuah kompetisi dengan cara bekerjasama antara pihak penyelenggara dengan pihak stasiun televisi untuk disiarkan secara langsung bagi pemirsa dirumah yang tidak dapat menyaksikan ke stadion. Selain perputaran bisnis melalui kerjasama pihak perusahaan dan pihak televisi para pendukung kesebelasan merupakan objek bisnis bagi para pemilik klub sepak bola maupun futsal, hal ini karena *supporter* merupakan hal terpenting bagi sebuah klub, selain sebagai penyemangat tim saat bertanding para *supporter* juga merupakan pemasukan yang cukup besar dari penjualan sebuah tiket pertandingan dan juga dari penjualan sebuah *merchandise* klub tersebut.

Jika berbicara *supporter* kesebelasan, Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangatlah fanatik terhadap klub sepak bola maupun futsal. Sebagai contoh fanatisme antara pendukung Persija Jakarta dan Persib Bandung yaitu Jakmania dan Bobotoh merupakan pendukung yang paling fanatik jika mendukung tim nya tersebut. Apalagi jika berbicara rivalitas antara kedua belah klub tersebut jika diibaratkan di Spanyol ada Barcelona dan Real Madrid yang disebut partai adu gengsi yaitu *El Clasico*, maka di Indonesia ada Persija Jakarta dan

Persib Bandung yang disebut-sebut *El Clasico* nya Indonesia. Tidak hanya itu Persebaya Surabaya dan Arema Malang juga merupakan kedua klub yang memiliki rivalitas tinggi serta masih banyak lagi klub klub di Indonesia yang memiliki fanatisme *supporter* yang sangat tinggi.

Dampak dari ditundanya kompetisi-kompetisi sepak bola dan futsal sangat berpengaruh besar bagi para pelaku usaha di bidang tersebut. Karena ketika sebuah kompetisi tidak berjalan banyak perusahaan yang menjaadi sponsor klub sepak bola dan futsal menghentikan proses kerja sama karena tidak adanya pertandingan dari klub tersebut, hal ini menyebabkan sebuah klub mengalami kerugian yang cukup besar untuk menggaji para pemain-pemain yang memiliki gaji besar sehingga banyak juga klub yang akhirnya memutuskan kontrak kerja pemain tersebut karena tidak adanya pemasukan dari *sponsorship*. Padahal memutuskan kontrak kerja tanpa kompensasi adalah menyalahi aturan, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut UU itu, setiap pemutusan kontrak termasuk karena alasan *force majeure* karena pandemi COVID-19 harus diiringi dengan pemberian pesangon. Ayat 1 Pasal 164 UU 13/2003 menyatakan "*Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang pengbargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)*".

Hal tersebut terjadi karena ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Karena jika berbicara kebijakan tentang sepak bola dan futsal, Indonesia merupakan negara yang terlambat dan paling tidak konsisten dalam mengambil sebuah keputusan. Karena dari awal Covid-19 ini masuk ke Indonesia banyak sekali kebijakan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, serta berdampak pada ditundanya kompetisi-kompetisi tersebut. Karena jika berkaca pada negara-negara di Eropa maupun disebagian Asia, negara-negara tersebut sangatlah cepat dalam mengambil keputusan dengan membuat kebijakan untuk berlangsungnya kompetisi berjalan kembali.

Sebagai contoh UEFA sebagai penyelenggara kompetisi antar klub di eropa yaitu UEFA Champions League sangatlah cepat untuk bergulir kembali untuk mengurangi resiko kerugian ekonomi akibat pandemic Covid-19 ini. Bagaimana tidak, pada saat Covid-19 menyerang ke seluruh penjuru dunia, jeda beberapa bulan kompetisi tersebut telah bergulir kembali walaupun harus tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan yaitu dengan tidak bolehnya para pendukung kesebelasan tim hadir langsung ke dalam stadion sepak bola guna menekankan penyebaran Covid-19.

Hal tersebut sangat berbanding terbalik jika melihat kasus di Indonesia yaitu PSSI sebagai lembaga penyelenggara kompetisi. Pada saat pandemic telah resmi menginfeksi warga Indonesia Kapolri langsung meng-hentikan kompetisi tersebut hingga kini belum kembalinya bergulir Liga Indonesia. Tetapi pemerintah tidak hanya diam, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), pemerintah mengadakan kompetisi pramusim sebagai ajang persiapan dan sebagai strategi untuk

memulihkan kembali sepak bola Indonesia yang sempat lumpuh selama beberapa bulan yaitu dengan membuat turnamen Piala Menpora 2021. Dalam hal ini kompetisi futsal lebih cepat dalam mendapatkan perizinan dari kepolisian dengan melanjutkan kembali kompetisi Liga Futsal Profesional yang sempat terhenti akibat dari pandemi.

Kompetisi-kompetisi tersebut mendapatkan izin setelah pihak PSSI, PT LIB dan Kapolri mengadakan pertemuan untuk membicarakan perizinan pertandingan guna memulihkan sedikit perekonomian di bidang olahraga tersebut dengan syarat segala kompetisi yang berlangsung wajib untuk mematuhi protokol kesehatan dan seluruh pihak terus mengevaluasi setiap kegiatan sebagai bahan acuan untuk kegiatan berikutnya.

Dengan kejadian pandemi tersebut membuat kegiatan-kegiatan di dalam sepak bola dan futsal menjadi terbatas dan perubahan budaya, yaitu dari yang tadinya stadion olahraga menjadi tempat yang selalu ramai jika ada sebuah pertandingan kini sepi dan tidak dianjurkannya para pendukung untuk datang ke stadion tersebut. Dan kejadian ini membuat dinamika pertandingan sepak bola maupun futsal tidak menegangkan seperti biasanya karena tidak adanya suara-suara yang bergemuruh dari para pendukung yang datang langsung ke stadion.

Fenomena ini adalah perubahan budaya dalam dunia sepak bola dan futsal. Untuk itu seharusnya seluruh pihak termasuk pendukung, pemain hingga pelaku usaha dapat mensiasati kejadian tersebut dan para pemangku kebijakan dapat mengambil keputusan yang tepat dan akurat agar tidak lagi terjadinya kerugian-kerugian akibat dari pandemi ini.

HWFC sendiri memandang kejadian-kejadian di dunia olahraga tersebut memang cukup menyulitkan di semua pihak, karena pandemi Covid-19 ini menyebabkan *culture shock* yang membuat para pemilik klub, penyelenggara kompetisi, *supporter*, hingga seluruh *stakeholder* terkait bingung menghadapinya. Karena pandemi Covid-19 ini bukanlah hanya sekedar wabah penyakit, tetapi juga wabah yang berdampak pada ekonomi yang berjalan.

HWFC berharap semoga para pemangku kebijakan di Indonesia terlebih Kapolri selaku pihak pemberi izin bisa lebih sigap dalam menanggapi kejadian ini supaya tidak terlalu lama dan memberikan dampak yang besar bagi seluruh pihak, dan semoga setelah pandemi ini berlalu tim nasional sepak bola maupun tim nasional futsal Indonesia dapat Berjaya di Asia hingga Internasional. []

Dunia Musik dan Pandemi

Muhammad Riza Fathoni

Pandemi Covid-19 hingga saat ini belum kunjung membaik, bahkan kasus di Indonesia kini semakin meningkat kian harinya. Sudah banyak upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19, seperti penegakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau biasa dikenal dengan 3M. Selain pencegahan menggunakan protokol kesehatan, kini pemerintah juga mengampanyekan vaksin untuk memutus penyebaran Covid-19 ini.

Aktivitas masyarakat hingga saat ini masih dibatasi yang mengakibatkan beberapa sektor kehidupan masyarakat menjadi terhambat, tetapi segala pembatasan dilakukan bertujuan untuk menekan dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19 agar pandemi segera berakhir. Sektor kehidupan yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 salah satunya adalah sektor musik. Musisi, *Event Organizer*, dan para vendor harus memutar otak untuk bagaimana tetap hidup ditengah merebaknya virus Covid-19 ini.

Dunia musik tak sebatas musisi yang membuat lagu tetapi juga menyangkut para label sebagai “sayap” daripada musisi tersebut tetapi ada juga musisi yang independen atau sekarang biasa dikenal sebagai musisi *indie*, lalu ada juga menyangkut *event organizer* yang membuat sebuah acara dengan menampilkan musisi-musisi, dan para vendor dari sebuah *event* seperti seperti *sound system*, *lighting*, panggung, dan tim

dokumentasi. Dan semuanya juga berkesinambungan dengan masyarakat sebagai penikmat musik sebagai bentuk hiburan. Tanpa kita sadari hampir seluruh perayaan baik formal atau non formal biasanya tidak bisa lepas dengan musik sebagai agenda hiburan dalam suatu acara, dari acara adat, pernikahan, acara *ceremonial*, acara skala nasional, bahkan kampanye politik pun menggunakan musik sebagai sarana hiburan. Jika ditinjau dari fungsi musik itu sendiri memang salah satu fungsi dari musik adalah sebagai sarana hiburan

Pada situasi inilah banyak dari kalangan musisi, *event organizer*, dan vendor yang mencari inovasi dan mengambil hikmah dari pandemi ini, seperti dampak pandemi yang mempengaruhi produktivitas dari para musisi untuk menciptakan lagu, ada yang terhambat dan tidak produktif, dan ada pula yang menjadikan momentum pandemi ini sebagai waktu menyalurkan pikiran kreatifnya dan disalurkan pada karya lagunya, baik *single*, album, bahkan membuat konser virtual sendiri dirumah. Membahas konser virtual, hal ini makin fenomenal dan viral pada saat pandemi ini, konser virtual merupakan suatu inovasi dalam menyelenggarakan sebuah pementasan musik yang selama ini hanya bisa dilakukan di area luas dengan jumlah penonton yang tidak sedikit dan sebab pandemi ini lah konser *offline* masih belum bisa kita nikmati.

Tak hanya berimbas pada konser-konser pensi sekolahan saja, bahkan konser besar tingkat nasional, *Synchronize Fest* pada akhirnya harus mengalah pada keadaan dan harus menjalankan *event*-nya tidak secara langsung, melainkan bekerja sama dengan televisi swasta. Itu baru sekelas nasional, konser skala internasional pun terkena imbas dari pandemi ini seperti *Hammersonic* pun terpaksa dibatalkan dan direncanakan akan

diselenggarakan jika sudah memungkinkan. Dan pada akhirnya para *event organizer* dan vendor menggeser haluan mereka ke kegiatan virtual yang dijalankan dengan sistem *online*, memang *euphoria* dan profit dari event online tidak sebanding dengan event *offline* tetapi memang tersudut oleh keadaan pandemi mau tidak mau harus memutar otak dan mencari inovasi dan tercetuslah event konser *online*.

Di balik sedang merebaknya konser virtual, kerinduan dengan konser *offline* memang tidak bisa dipungkiri, setelah terbelenggu pandemi masyarakat sangat perlu hiburan sebagai pelampiasan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Mungkin di Indonesia sendiri untuk menjalankan konser *offline* masih sulit dilakukan, melihat dari kondisi pandemi di Indonesia sendiri yang sedang melambung kembali.

Di luar negeri sendiri sudah berani memulai kembali konser *offline*, contohnya seperti band *Foo Fighters*, band kenamaan asal Amerika Serikat menggelar konser dengan ribuan penonton ditengah kondisi pandemi Covid-19, konser yang digelar di Madison Square, New York, ini layaknya konser pada masa sebelum pandemi, yang membedakan adalah penonton konser ini harus melampirkan bukti sudah divaksin sebelum masuk ke area konser dari band yang di kepalai oleh Dave Grohl, mantan drummer dari *band* Nirvana.

Keadaan sekarang memang menuntut semua untuk beradaptasi seperti di dunia musik khususnya di Indonesia, banyak musisi yang pada akhirnya harus *home recording* untuk menciptakan karyanya sendiri, menciptakan lagu yang selaras dengan keadaan sekarang, memaksimalkan penjualan *merchandise* melihat jarang ada panggung untuk mereka. Lalu sektor *Event Organizer*, melihat pasar konser *online* tidak memungkinkan untuk

dijalankan, akhirnya EO harus memutar otak untuk bertahan yaitu dengan menggelar konser virtual. Dan untuk sektor vendor pun banyak yang harus gulung tikar karena pandemi ini, ada juga yang membuat inovasi untuk membuka usaha baru. Contoh seperti BAYUSVARA yang merupakan vendor *sound system* yang sudah lumayan dikenal, selain memutar otak untuk *sound system* skala konser online, BAYUSVARA juga merintis usaha sampingan yaitu SEGARSVARA, SEGARSVARA merupakan usaha antar jemput bahan makanan seperti sayur, buah, daging, dan bumbu dapur. Pandemi memang menuntut kita untuk membuat inovasi.

Untuk ke depannya setelah pandemi ini berlalu, akan banyak sekali perubahan dalam kehidupan khususnya dalam dunia musik. Musisi akan banyak meluncurkan karya-karya mereka melihat banyak musisi yang menyicil album mereka dan berencana akan diluncurkan setelah pandemi selesai, selain itu pastinya pemaksimalan *merchandise* akan terus meningkat dan keterampilan musisi kini makin bertambah karena sebelumnya di masa pandemi mereka dituntut memproduksi karya mereka sendiri dirumah.

Untuk sektor *Event Organizer* pastinya konser virtual akan tetap menjadi opsi, dan untuk konser *offline* pastinya diperlukan persyaratan seperti konser yang sudah dilaksanakan di luar negeri yaitu melampirkan bukti bahwa telah divaksin. Dan untuk para vendor menjadi sebuah keberkahan bisa melakukan usahanya seperti sedia kala. LM Pervagatus sendiri yang bergerak di bidang musik dan *event organizer* juga telah beradaptasi dan berinovasi hampir seluruh kegiatan dan program kerja seperti memaksimalkan kegiatan *online* agar bisa meminimalisir resiko dari pandemi Covid-19. []

BAB III:
PENDIDIKAN DAN
PELAYANAN PUBLIK



Polemik Biaya Pendidikan Kuliah Saat Pandemi Covid-19

Harits Kholilurrohman, DPM FISIP UMJ

Pandemi Covid-19 mengubah tatanan hidup masyarakat, mulai dari timbulnya masalah kesehatan, merosotnya aktivitas jual beli, dan juga aktivitas pendidikan yang terhambat. Kebijakan pemerintah Indonesia guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sudah banyak dikeluarkan termasuk kebijakan disektor pendidikan. Beberapa maklumat pun dikeluarkan, guna mencegah penyebaran virus yang tengah menyerang negara Indonesia selama beberapa waktu terakhir.

Salah satu isi kebijakan yang dikeluarkan yang dikeluarkan pemerintah yaitu untuk menunda seluruh kegiatan akademis dan non akademis selama kurang lebih 2 minggu kedepan pada bulan maret 2020. oleh karena itu beberapa perguruan tinggi pun memberlakukan sistem kuliah daring (*online*) tujuannya agar mahasiswa tetap dapat melakukan kegiatan perkuliahan meskipun tidak bertatap muka langsung dengan dosen pengampu sehingga jeda waktu 2 minggu dapat dimanfaatkan secara maksimal

Namun pandemi Covid-19 masih terus berlanjut hingga akhir tahun 2020 bahkan hingga saat ini. Oleh sebab itu praktik kuliah belum bisa sepenuhnya kembali ke kondisi normal. Beberapa perguruan tinggi yang sedang mempertimbangkan untuk membuka kembali aktivitas dikampus hanya memfokuskan pada hal-hal vital yang tidak bisa dilakukan secara online, dan aktivitas yang kembali dilakukan dikampus pun tetap

dengan pembatasan dan mengikuti protokol kesehatan dan kebersihan yang dianjurkan.

Metode pembelajaran jarak jauh tentunya merupakan langkah alternatif terbaik sejauh ini demi berjalannya perkuliahan dikampus, tentunya metode ini tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Seperti membuat mahasiswa jadi bisa lebih hemat mengeluarkan biaya transportasi menuju kampus untuk mengikuti perkuliahan, waktu yang dihabiskan kuliah secara tatap muka lebih banyak dibandingkan kuliah daring. Hal ini tentunya bisa menghemat waktu dan tenaga mahasiswa. Adapun kekurangannya antara lain seperti mahasiswa dan dosen terkadang memiliki keterbatasan dalam praktek, akses internet yang sulit, dan penyampaian materi dan penerimaan materi tidak maksimal.

Faktanya, mahasiswa yang dihibmabu untuk melakukan kuliah jarak jauh masih harus tetap membayar uang kuliah secara penuh. Banyak sekali aspirasi yang dilontarkan mahasiswa ke pihak terkait agar diberlakukannya pemotongan UKT atau pemberian subsidi bagi mahasiswa yang terdampak aspek ekonominya karena pandemi Covid-19. Langkah cepat tentunya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang segera mengeluarkan kebijakan baru terkait keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Kemendikbud akan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa yang menghadapi kendala ekonomi selama pandemi Covid-19.

Keringanan tersebut berupa penyesuaian UKT, hilangnya kewajiban membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil Satuan Kredit Semester (SKS), dan mahasiswa

diakhir kuliah maksimal membayar 50% dari UKT jika hanya mengambil 6 SKS. Selain itu, disebutkan pula bahwa pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringana UKT atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa.

Namun, hingga saat ini kebijakan terkait keringanan UKT masih belum memenuhi keinginan mahasiswa. Portal-portal berita pun masih merilis berbagai aksi mahasiswa yang menuntut diberikannya sistem keringanan UKT yang merata. Persyaratan tidak masuk akal dan informasi yang simpang siur juga menjadi alasannya. Banyaknya persyaratan yang diminta pihak kampus membuat mahasiswa merasa terbebani karena dampak ekonomi yang dirasakan setiap mahasiswa pun berbeda. Beberapa mahasiswa tak serta merta mengalami kemerosotan ekonomi yang signifikan, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa jumlah UKT dirasa cukup memberatkan. Persyaratan yang tidak memihak kepada mahasiswa dengan kondisi tersebut juga menjadi alasan masih belum diterimanya kebijakan keringanan UKT yang diberikan.

Keringanan UKT ini bukan hanya untuk meringankan beban para mahasiswa yang terdampak, melainkan juga berkaitan dengan timbal balik yang diberikan oleh pihak kampus terhadap mahasiswa. Pemberlakuan sistem kuliah daring dari rumah menyebabkan fasilitas yang seharusnya diberikan oleh kampus tidak dapat dinikmati mahasiswa. Bahkan, mahasiswa juga dibebani oleh biaya-biaya tambahan untuk menunjang kegiatan perkuliahan dirumah. Sehingga, dengan adanya keringanan UKT yang merata bagi seluruh mahasiswa diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi mahasiswa selama pandemi ini. []

Meningkatkan Performa Digitalisasi Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19

Annisa Miskiyah, HIMIA

Corona *Virus Diseases* 2019 atau disebut dengan nama lain Covid-19 telah menjadi permasalahan yang besar yang mana telah berdampak pada berbagai sektor seperti penerbangan, transportasi, hotel dan restoran. Namun, yang paling terlihat jelas dampak dari adanya Covid-19 ini yaitu kemerosotan ekonomi dunia dan juga mengancam kesehatan manusia.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya pertama kali munculnya virus ini yaitu berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 8 Desember 2019 pada saat itu diketahui adanya pasien yang terinfeksi Covid-19. Adanya virus ini membawa kecemasan dan juga kepanikan bagi dunia. Yang mana keemasan dan kepanikan tersebut muncul di saat para warga negara cemas akan penambahan dan penyebaran Covid-19 yang cukup cepat. penyebaran utamanya adalah dari kontak jarak dekat, orang ke orang melalui jalur pernapasan dari percikan batuk atau napas.

Di Indonesia sendiri, untuk jumlah kasus aktif atau pasien yang masih membutuhkan perawatan medis. Per 2 Mei 2021 berdasarkan data *covid19.go.id* bertambah sebanyak 510 kasus dengan jumlah total keseluruhannya sebanyak 100.760 kasus dengan presentasinya di angka 6,0%. Adapun beberapa pasien yang terkonfirmasi positif terdampak covid-19 melalui

metode pemeriksaan RT-PCR/TCM dan rapid antigen, bertambah sebanyak 4.394 kasus. Dengan jumlah kumulatifnya, atau pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga hari ini, mencapai 1.677.274 kasus. Tetapi Untuk pasien meninggal hari ini juga bertambah sebanyak 144 kasus dan kumulatifnya mencapai 45.796 kasus atau persentasenya di angka 2,7% dari pasien terkonfirmasi positif.²

Namun, apabila kita lihat perkembangan akan penyebaran Covid-19. Saat ini pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dengan memberikan program vaksinasi kepada masyarakat Indonesia sendiri. Apabila dilihat di beberapa kota yang ada di Indonesia program vaksinasi ini terus berjalan dengan jumlah penerimanya meningkat melebihi 12 juta orang atau angka 12.457.164 orang.³

Jika kita perhatikan dengan bertambahnya masyarakat yang terdampak Covid-19 ini membuat semua aktivitas yang tadinya dilakukan dengan *face to face* atau tatap muka tetapi sekarang kegiatan tersebut dilakukan secara daring atau *online* yang mana kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat dan pemerintah khususnya untuk meningkatkan performa digitalisasi pelayanan publik yang ada guna meminimalisir kegiatan atau interaksi langsung antar manusia dan jika kita lihat pandemi ini merupakan salah satu momentum

² Covid19.go.id (<https://covid19.go.id/p/berita/pasien-sembuh-terus-meningkat-mencapai-1530718-orang>)

³ Covid19.go.id (<https://covid19.go.id/p/berita/pasien-sembuh-terus-meningkat-mencapai-1530718-orang>)

yang tepat guna meningkatkan performa digitalisasi yang ada saat ini.

Pandemi Covid-19 apabila kita lihat kembali banyaknya pelajaran yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas sektor-sektor di pemerintahan saat ini, seperti hal tata kelola birokrasi. Jika dilihat dalam kondisi apapun dan bagaimanapun birokrasi harus tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik. adapun di masa pandemi covid-19 ini birokrasi harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi dan juga komunikasi dalam segala hal di sektor pemerintahan.

Fungsi dari optimalisasi teknologi yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, jika optimalisasi tersebut tidak hanya pada pelayanan publiknya saja. Tetapi optimalisasi terhadap penggunaan teknologinya perlu dilakukan baik dalam hal rapat kantor, pengisian kinerja pegawai dan aktivitas-aktivitas lainnya.

Dapat kita rasakan pada era globalisasi seperti ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang dengan pesat. Mengapa demikian? Karena, perlunya efisiensi, kecepatan menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan juga transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Jika kita lihat pada era otonomi daerah saat ini perlunya kesadaran pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut *e-government*. Kesadaran akan penggunaan e-government dalam lingkungan pemerintahan haruslah tinggi dan juga mahir. Karena melalui *e-government* sendiri pelayanan publik dapat terwujud.

Dengan mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan dapat membuat semua kegiatan pemerintahan yang ada dapat terealisasi dengan baik dan juga lebih efektif dan efisien. Yang mana di dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan itu sendiri dapat memudahkan pemerintah dalam berinteraksi dengan masyarakat tanpa harus berinteraksi secara langsung di saat kondisi pandemi seperti ini, dan juga dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada saat ini.

Dapat kita lihat bahwasannya pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau serta berkualitas adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah guna memberikan pelayanan yang memuaskan untuk masyarakatnya. Apabila hal-hal tersebut ingin tercapai dan dapat diselenggarakan perlunya digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan transparansi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Apabila digitalisasi pelayanan publik sudah terealisasi pemerintah harus meningkatkan pula keamanan, keakuratan, serta standar pelayanan yang benar. Menurut Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, ada 14 komponen dalam standar pelayanan yang menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Perlunya perhatian terhadap komponen dalam standar pelayanan guna memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang telah menjadi tolok ukur yang dibuat oleh pemerintah.

Selain itu, ada salah satu hal terpenting agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat terwujud dengan baik

yaitu dengan menarik minat dan juga partisipasi masyarakat. untuk pemerintahan pun harus memeberikan dan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat mengutarakan pendapatnya baik dalam hal memeberikan koreksi, ulasan dan pandangan terkait standar dan pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah. []

Transformasi dan Tantangan Pelayanan Publik di Era *New Normal*

Risma Wati, Administrasi Publik

Virus Corona pertama kali diumumkan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa terdapat dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif terjangkit Virus Corona pada tanggal 02 Maret 2020. Artinya sudah satu tahun Indonesia dihadapkan pada Pandemi Covid-19. Untuk mencegah rantai penyebaran Virus, Pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan. Di antaranya yaitu membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau masyarakat untuk *work from home* (bekerja, belajar dan beribadah di rumah), pembatasan fisik (*physical distancing*) dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Akibat kebijakan tersebut, membawa dampak secara langsung bagi masyarakat tak terkecuali pada sektor pelayanan publik yang menyelenggarakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan publik menjadi terhambat karena penerapan protokol kesehatan tentunya membuat akses pelayanan publik kepada masyarakat menjadi terbatas. Karena kegiatan yang melibatkan banyak orang harus dihindari terutama pelayanan publik yang mengumpulkan banyak orang. Selain itu, prosedur pelayanan tidak dapat berjalan seperti biasanya sehingga pelayanan yang di lakukan secara *offline* menjadi tidak maksimal.

Berbagai penyesuaian dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan yaitu mentransformasi pelayanan tatap muka menjadi pelayanan secara *online*. Tantangannya adalah bagaimana menerapkan pelayanan dengan sistem *online* secara maksimal. Memang dengan memanfaatkan teknologi merupakan cara yang tepat agar pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan namun pelaksanaan pelayanan secara *online* belum maksimal karena masih banyak yang belum mengetahui alur pelayanan secara *online* dan masih banyak masyarakat yang tidak paham mengenai teknologi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan *online* secara maksimal harus dibarengi dengan memberi sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang akan mengakses layanan publik sehingga penyelenggaraan pelayanan publik di era *new normal* dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan transformasi pelayanan menjadi *online*, juga perlu kewaspadaan terhadap keamanan siber. Karena jangan sampai pelayanan publik yang di laksanakan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pegawai yang mempunyai potensi IT sehingga perlu pelatihan kemampuan teknologi.

Peran utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik untuk menyejahterakan masyarakat sehingga dalam kondisi apa pun pelayanan tetap harus dilakukan secara optimal. Pelayanan prima merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pelayanan yang prima akan terwujud apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan penerima layanan. Pemenuhan harapan masyarakat terkait pelayanan publik juga merupakan tantangan dari di era

New Normal. Yaitu adanya kejelasan informasi pelayanan, kepastian pelayanan dan responsivitas pelayanan.

Perlu strategi untuk mewujudkan hal tersebut. Yaitu melakukan penyederhanaan *standard operating prosedur* (SOP) dengan memanfaatkan TIK yang ada, menggunakan informasi dalam menyampaikan standar pelayanan agar semua masyarakat mengetahui secara jelas. Kualitas *output* dari produk layanan harus di perhatikan jangan sampai pelayanan yang di berikan tidak berkualitas dan harus memperhatikan protokol kesehatan. Walaupun sudah memasuki New Normal tetap harus memperhatikan protokol kesehatan agar membantu mencegah rantai penyebaran Virus Covid-19.

Dalam hal pemberian pelayanan publik, kebijakan *work from home* bagi ASN memang mengubah keadaan yang biasanya bekerja secara langsung di kantor menjadi beberapa dilakukan dengan bekerja di rumah. Dalam kebijakan *work from home* pemerintah tetap harus memperhatikan kebutuhan khususnya mengenai teknologi. Karena permasalahan dari kebijakan *work from home* bagi ASN adalah ketidakadaan teknologi seperti komputer, laptop dan jaringan internet di rumah. Terutama bagi ASN yang tinggal di perdesaan.

Pekerjaannya juga harus diperhatikan jangan sampai dengan kebijakan WFH beban pekerjaan ASN menjadi lebih banyak sehingga tidak ada waktu libur atau justru beban kerja menjadi berkurang. Jadi, hal ini perlu diperhatikan agar walaupun sebagian ASN dalam memberikan pelayanan di rumah tetap pelaksanaannya maksimal. Selain itu, *monitoring* atau pemantauan juga harus dilakukan agar pelaksanaan pelayanan publik secara *online* dapat berjalan dengan lancar.

Dampak dari Pandemi Covid-19 sebenarnya membawa dampak positif karena dapat mendorong berbagai inovasi dan mendorong penerapan teknologi. Tantangannya adalah integrasi data diantara mekanisme pelayanan dan antar lembaga. Karena tidak ada artinya ketika teknologi yang digunakan tidak disertai dengan integrasi data diantara mekanisme pelayanan dan antar lembaga. Karena yang terjadi selama ini mengenai urusan kependudukan, kepegawaian, pernikahan hingga perpajakan dilaksanakan oleh institusi yang berbeda sehingga akan tidak efektif jika dilakukan secara *online*. Sehingga dengan integrasi data yang dilakukan dalam pelayanan maka pelaksanaan proses pelayanan akan berjalan dengan efektif.

Dalam era *new normal* seperti ini, tentu harus berhati-hati dan waspada karena wabah Covid-19 belum berakhir. Ketidaksiwaspan dan ketika tidak menetapkan protokol kesehatan dikhawatirkan wabah gelombang kedua akan menjadi lebih berbahaya. Kewaspadaan yang dilakukan juga mengenai pelayanan publik, karena pelayanan publik mengingat pelayanan publik merupakan salah satu tugas negara yang paling penting. Kapasitas pemerintah dalam menguji orang yang positif Covid-19 masih rendah dan belum dilakukan secara sistematis dan hal ini menyebabkan data korban yang terinfeksi tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. []

***Public Trust* dalam *Agile Government* di Masa Pandemi Covid-19**

Ulung Diah, HIMIA

Wabah *corona virus disease-19* (Covid-19) yang menyebar secara global telah menjadi pandemi global dan menimbulkan kekacauan dari berbagai sektor kehidupan. Di Indonesia, kasus positif covid-19 sendiri diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dan belum terkendali sepenuhnya sampai saat ini. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan dunia masuk ke dalam era VUCA (*volatile, uncertainty, complex, dan ambiguous*). Istilah ini pertama kali digunakan pada dunia militer di tahun 1990-an yang berarti perubahan dunia yang cepat, bergejolak, tidak pasti, kompleks dan tidak jelas. Sama halnya dengan yang kita hadapi saat ini, pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai masalah yang cepat berubah, tidak terprediksi, tidak pasti, kompleks dan dapat menyebabkan gejolak di masyarakat.

Sebagai aktor utama, pemerintah harus belajar dengan cepat dan tepat serta mampu melakukan penyesuaian dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Birokrasi yang *rigid* dan hierarkis dapat menjadi penghambat dalam menyelesaikan masalah. Masalah birokrasi yang timbul dalam penanganan Covid-19 di Indonesia diantaranya ialah adanya sikap mengabaikan yang ditunjukkan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia, sikap tersebut meyakini bahwa Covid-19 bukanlah ancaman bagi Indonesia sehingga tidak melakukan antisipasi

potensi bencana pandemi oleh para pemangku kebijakan. Selain itu, koordinasi yang tidak terjalin dengan baik antara pemerintah pusat dengan daerah menyebabkan kebijakan penanganan Covid-19 terfragmentasi antar instansi pemerintah pusat maupun antara pemerintah pusat dengan daerah.⁴

Maka dari itu, pemerintah harus mengubah birokrasi yang *rigid* dan hierarkis menjadi birokrasi yang *agile* sehingga nantinya pemerintah mampu untuk menyelesaikan masalah publik di era VUCA. Konsep pemerintahan yang *agile* merupakan solusi terhadap inefisiensi penanganan Covid-19 dalam organisasi sektor publik. Pemerintahan yang *agile* berarti pemerintahan yang cergas, tangkas dan adaptif. Dengan menerapkan konsep *agile*, sebuah institusi mampu mengetahui cara melakukan identifikasi masalah mulai dari penyebab sampai dengan peluang yang ditemukan untuk ditindaklanjuti. Dalam konsep ini, tindaklanjut dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat dan menyangkut segala aspek perubahan yang efektif dan dapat dirasakan hasilnya.

Selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan covid-19 mulai dari pembatasan sosial, pembatasan kontak fisik, hingga pembatasan aktivitas masyarakat seperti aktivitas kantor yang kemudian dilaksanakan dari rumah (*work from home*). Namun, dari banyaknya capaian yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19 tidak mendapat respon sepenuhnya dari publik sehingga berdampak pada penurunan *public trust*. Untuk mewujudkan *agile government* diperlukan kerja adaptif dan kemampuan daam mengomunikasikan program pemerintah.

⁴ Wawan Mas'udi & Azifah R. Astrina. 2020. Problematika Kebijakan Krisis COVID-19 di Indonesia (No. 1). Yogyakarta.

Dalam penanganan Covid-19 ini, pemerintah perlu melakukan *branding* yang dapat membuat masyarakat merasa pemerintah hadir dalam menangani permasalahan publik, apabila pemerintah mampu menciptakan kedekatan emosional dengan masyarakat maka reputasi pemerintah akan menjadi kuat karena pemerintah sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Konten yang akan dilakukan dalam *branding* perlu dipahami secara mendalam permasalahan yang terjadi dan apa pemberian solusi terbaiknya.⁵

Selain *branding* program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19, media massa juga memiliki peranan penting untuk menciptakan *public trust* dari masyarakat. Di masa pandemi Covid-19 di Indonesia, banyak berita dan informasi yang tidak benar (hoaks) sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, kebingungan tersebut dapat menyebabkan ketakutan yang berlebihan. Sebagai contoh, kebingungan yang sempat terjadi ialah adanya bantuan finansial bagi pekerja tahun 2000-2021 sebesar 3,5 juta rupiah dari BPJS Kesehatan, berita ini banyak dimuat dalam sosial media seperti *facebook*.

Narasi dalam tulisan tersebut berisi bahwa mereka yang bekerja di antara tahun 2000 dan 2021 berhak menerima bantuan sosial finansial sebesar Rp 3.550.000 dan memberikan daftar nama lengkap serta *link* untuk melakukan pengecekan oleh masyarakat yang membacanya lengkap dengan foto dan logo yang menimbulkan kesan kebenaran berita. Namun, berita

⁵HumasLANRI, "Pentingnya Public Trust dalam Agile Government, LAN Gelar Webinar "Strategi Branding: Upaya Membangun Public Trust Pemerintah di Tengah Tuntutan Agile Government"", <https://lan.go.id/?p=4261> (diakses pada 1 Mei 2021)

tersebut kemudian dibantah oleh Humas BPJS Kesehatan, pihaknya mengatakan bahwa penyebar hoaks tersebut mencatut foto dan logo yang diambil dari *website* BPJS, informasi tentang BPJS yang akurat hanya ada di *website* resmi BPJS Kesehatan.

Dalam situasi pandemi seperti saat ini perlu adanya kerangka pemberitaan dan informasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat (*pubic trust*) terhadap pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat pun harus terjalin dengan sangat baik untuk dapat mengatasi persoalan pandemi bersama. Pemerintah harus melakukan pendekatan-pendekatan yang dapat mengambil hati masyarakat sehingga proses komunikasi yang disampaikan pun akan terlihat dengan jelas dan transparan.

Kepercayaan masyarakat (*pubic trust*) sangatlah penting dalam penerapan *agile government* karena pemerintah dituntut untuk adaptif terhadap perubahan yang terjadi, saat ini perubahan terjadi di berbagai sektor kehidupan akibat pandemi covid-19 seperti perubahan pada sektor ekonomi, dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan sebagian ada yang tidak mendapat honor secara utuh karena adanya pemotongan sekian persen akibat menurunnya pendapatan yang diraih perusahaan.

Sehingga saat ini pemerintah sangat diharapkan dapat bekerja secara transparan, tanggap, akuntabel dan mampu melakukan komunikasi dua arah kepada masyarakat sebab selama ini, komunikasi yang terjadi biasanya hanya terjadi satu arah saja yaitu dengan dilakukannya keterangan pers oleh satgas penanganan Covid-19. Pemerintah perlu belajar dan bekerja lebih keras lagi sebagai aktor dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat.

Apabila pemerintah mampu melakukan komunikasi dua arah maka akan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tentunya akan menguntungkan bagi pemerintah dalam menjalankan menangani pandemi Covid-19 dengan cerdas, tanggap, dan adaptif karena mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. []

BAB IV:
MEDIA DAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT



Pemberitaan Media Komunikasi: Efektivitas dan Pengaruhnya pada Presepsi Masyarakat tentang Covid-19

Jodhy Hermawansyah, HIMAKOM FISIP UMJ

Akhir 2019, dunia dikejutkan dengan berita munculnya virus baru yang konon asalnya dari Wuhan, China. Virus Corona atau Covid-19 (*Corona Viruse Disease 2019*) penyakit baru yang hingga saat ini melanda dunia. Beberapa Negara mungkin telah terbebas dari jeratan penyakit ini, namun Indonesia hingga kini masih tertatih-tatih untuk dapat membebaskan Indonesia dari Covid-19. Hingga 21 Juni, Indonesia mengkonfirmasi jumlah kasus positif Covid-19 sebesar 1.989.909 (WHO) jiwa dengan korban meninggal sebesar 54.662. Mengerikan jika dibayangkan bagaimana dampak Covid-19 terhadap persoalan bangsa, ekonomi, pemerintahan, kesehatan, hingga media dan komunikasi.

Munculnya wabah Covid-19 memunculkan kepanikan, karena mengantisipasi virus ini berhadapan dengan berbagai aspek kehidupan (Muchtar, 2020). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pencegahan dan pembatasan Covid-19, di antaranya imbauan *social distancing*, *physical distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan imbauan #dirumahaja. Kebijakan ini adalah langkah awal yang dilakukan dengan merujuk Negara lain yang lebih dulu terjangkau. China misalnya yang memilih tindakan karantina total

atau *lockdown* pada Januari 2020. Kebijakan lockdown dikatakan efektif dalam mereduksi penyebaran Covid-19, oleh karenanya sekitar 15 Negara memberlakukan kebijakan karantina total seperti di Italia, Spanyol, Perancis, Belgia, Malaysia, dan lainnya. (*Kompas.com*, 2020).

Media turut meramaikan pemberitaan tentang berbagai perkembangan terbaru Covid-19 termasuk kebijakan pemerintah dan dampaknya pada masyarakat. Media online terus mengupdate situasi terkini tentang Covid-19 dari berbagai sudut pandang dengan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses. Konsumsi media yang cukup tinggi memunculkan dampak dari media yang menimbulkan berbagai spekulasi dan interpretasi pembaca. Terpaan media berpengaruh pada pembentukan kepercayaan, sikap bahkan perilaku masyarakat.

Media mengonstruksi pikiran melalui pemberitaan yang muncul dengan pemilihan sudut pandang, penentuan sumber berita, dan mendefinisikan aktor serta adanya satu peristiwa. Sebagian masyarakat menilai, saat ini media dikatakan selalu membagikan berita untuk menyebar “ketakutan” kepada masyarakat dan bukan menampilkan berita positif untuk membangun pikiran positif masyarakat tentang Covid-19, hal tersebut memungkinkan untuk munculnya peluang baru, sehingga Indonesia dapat terlepas dari Covid-19.

Namun, apakah media Indonesia melakukan hal yang efektif untuk mengurai ketakutan dan membawa pesan positif ada masyarakat? Dan apa pengaruhnya pada persepsi masyarakat tentang Covid-19 dengan pemberitaan media yang ada?

Efektivitas Media Komunikasi pada Masa Pandemi

Permasalahan komunikasi media yang efektif pada pandemi Covid-19 adalah kapan pemerintah harus memperhatikan efektivitas komunikasinya? Dalam manajemen komunikasi pada masa krisis dikenal dengan 4 tahapan, yaitu prodromal, akut, kronis, dan resolusi (Coombs & Holladay, 2010). Prodromal mulai ketika ada tanda-tanda munculnya krisis. Tahap akut hadir pada saat diumumkan terjadinya krisis. Tahap kronis adalah selama masa terjadinya krisis.

Tahap resolusi ada tahap saat krisis sudah mereda. Keempat tahap itu terdapat 5 kunci komunikasi media yang efektif dan harus terpenuhi untuk mencapai komunikasi media yang efektif selama masa pandemi. Menurut Matthew Seeger dalam *The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* menjelaskan lima kunci, yaitu sumber informasi yang kredibel, kejujuran dan keterbukaan informasi, bertujuan untuk membujuk orang mengambil tindakan yang mengurangi bahaya penularan, disusun berdasarkan pendapat parah ahli, bukan amatiran, dan konsisten (Seeger, 2002).

Kredibilitas sumber pesan berkaitan dengan sumber yang dapat dipercaya dan memiliki keahlian. Sedangkan kejujuran dan keterbukaan informasi dapat mengurangi terjadinya rumor, kecemasan dan kepanikan yang tidak perlu. Kejujuran sangat perlu dilakukan dalam mengkomunikasikan apa yang diketahui dan tidak diketahui terkait faktor risiko, yang harus dihindari ialah upaya menyembunyikan informasi dengan dalih menghindari terjadinya kepanikan dan menawarkan scenario yang terlalu optimis dan dilarang untuk membungkam suara-suara yang mengekspresikan kekhawatiran. Catatan terpenting dalam keterbukaan informasi adalah pemerintah

harus mampu melakukan komunikasi yang meyakinkan tanpa berlebihan (Sandman, 2004).

Komunikasi media yang dilakukan pemerintah pada pandemi Covid-19, berdasarkan pengamatan dan observasi masih belum efektif. Hal itu disebabkan masih banyaknya pernyataan Menkes yang menentang peneliti Harvard untuk membuktikan virus corona ada di Indonesia (*cnmindonesia.com*), Menkes menyatakan bahwa masyarakat Indonesia dengan Difteri saja kita tidak takut, apalagi corona (*vivanews.com*) serta berbagai pernyataan dari pejabat pemerintahan lainnya yang senada dan terkesan tumpang tindih. Sebab lainnya adalah konsistensi pesan, misalnya silang sengkabut pernyataan pemerintah pusat terkait ketentuan mudik. Hal ini memunculkan dampak kontra produktif terhadap upaya mencegah meluasnya pandemi Covid-19.

Hambatan yang paling utama dalam komunikasi media yang efektif pandemi Covid-19 adalah kontroversi privasi pasien melawan kepentingan masyarakat dalam upaya mencegah meluasnya pandemi. Upaya mencegah meluasnya pandemi membutuhkan keterbukaan informasi terutama berkaitan dengan pasien yang telah dinyatakan positif Covid-19. Namun di sisi lain, hal itu bertentangan dengan privasi pasien. Di Korea Selatan, pemerintah menyebarkan data pasien positif covid-19 berikut domisili, tempat berkerjanya, bagaimana dia tertular covid-19 hingga kegiatan yang dilakukan.

Pemerintah Korea Selatan membagikannya melalui rangkaian SMS yang disampaikan secara serempak kepada seluruh warga Korea Selatan. Rangkaian SMS yang dikirim menyampaikan ada dimana keberadaan pasien tersebut. Bahkan ketika mencari data secara online berdasarkan nomor kasus,

maka akan tampil informasi detail pribadi dari foto wajah, hingga foto keluarga bahkan informasi yang bersifat privasi lainnya. Informasi yang sifatnya pribadi tersebut menjadi hal yang kontroversi karena disampaikan secara terbuka melalui berbagai media (*www.bbc.com*).

Pemerintah Negara lain yang memilih transparan dalam menyampaikan data terkait pasien Covid-19 adalah Taiwan, dan Singapura. Menariknya, meskipun Singapura membuka data terkait dengan riwayat tempat yang didatangi pasien positif Covid-19, namun terkait pengungkapan nama dan identitas lainnya, pemerintah terlebih dahulu meminta persetujuan kepada pasien. Sementara pemerintah Iran dan Arab Saudi cenderung bersikap tertutup tentang data pasien Covid-19.

Di Indonesia sendiri, kontroversi terkait privasi pasien bahkan terjadi dalam tataran pengaturannya dalam perundang-undangan. Pasal 57 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Namun ayat (2) menegaskan bahwa hak tersebut tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, atau kepentingan yang bersangkutan.

Di sisi lain, Pasal 26 ayat (1) UU ITE Nomor 11 tahun 2008, setiap informasi menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Prakteknya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil kebijakan menampilkan kasus yang dipilih sebagai representasi guna memudahkan visualisasi dalam menggambarkan kronologi dan perkembangan Covid-19. Sementara terkait data pribadi atau personal tidak ditampilkan.

Presepsi yang Terbentuk

Presepsi masyarakat yang hadir akibat konsumsi media sangat bergantung pada apa yang disajikan oleh media tersebut dan memilih apa yang penting untuk masyarakat, seperti yang dikatakan *Agenda Setting Theory*. Teori yang menganggap bahwa isi media mengubah persepsi orang untuk memikirkan apa yang penting untuknya. *Agenda Setting* mempunyai kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan menggiring kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa.

Dalam teori ini, audiens bersifat pasif sehingga tak dapat mengontrol efek yang menyimpannya sehingga hasil yang didapatkan dari membaca media massa sudah mulai terpengaruh dan mengaktualisasikan informasi yang di dapat dari media massa, setelah masyarakat mengkonsumsi media massa secara aktif dan masif. Hasil analisa, perilaku *sosial distancing* yang diimplementasikan masyarakat berdasar apa yang dibaca, juga perilaku menggunakan hand sanitizer berdasarkan informasi yang masyarakat terima dari media.

Hal ini semakin menunjukkan kekuatan efek media massa terhadap masyarakat tanpa keterlibatan *opinion leader*. Persepsi juga terbentuk karena media adalah stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ indera yang kemudian masuk ke dalam otak. Masyarakat melakukan proses pencarian informasi untuk dipahami dengan pancaindra. Persepsi lain yang muncul akibat konsumsi media, yaitu terkait Virus Corona ini, masyarakat takut terinfeksi oleh virus ini akibat media yang menyebarkan bahaya dan kondisi Indonesia akibat virus ini.

Efek kuat media mampu mempengaruhi dimensi efek komunikasi massa yaitu dari sisi kognitif meliputi peningkatan kesadaran dan tambahan pengetahuan, dibuktikan dengan tingkat kesadaran bahwa Virus Corona bukan seperti penyakit flu biasa dan berbagai pengetahuan terkait tindakan pencegahan penyebaran virus. Dengan media, baik media massa maupun media sosial sangat membantu khalayak untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat terkait perkembangan berita mengenai Virus Corona. Segi afektif–efek yang berhubungan dengan emosi, perasaan dan sikap. Efek lanjutan dari efek kognitif didapatkan oleh masyarakat. Informasi yang diterima dari sisi kognitif dapat dirasakan oleh khalayak, seperti gelisah, takut, dll.

Perasaan yang hadir didapat berdasarkan pengetahuan yang diterima. Perasaan takut dan gelisah serta khawatir terbentuk pada masyarakat setelah mengkonsumsi pemberitaan media terkait Virus Corona. Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri masyarakat dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Perilaku masyarakat tentang mengenakan masker ketika bepergian, memakai hand sanitizer, menjaga jarak dengan orang lain merupakan bentuk efek behavioral yang berawal dari pengetahuan dan perasaan yang sudah terbentuk tentang Virus Corona.

Adanya perubahan persepsi dari masyarakat yang mengkonsumsi media secara masif dapat disimpulkan bahwa efek media sangat kuat. Tepat dengan teori *Powerful effects model* yaitu teori yang memprediksi bahwa media secara cepat dan berpotensi kuat mempengaruhi audiens. Selain itu ada teori peluru (*bullet theory*) oleh Wilbur Schramm. Teori ini menjelaskan efek media mengalir secara langsung dari media ke individu

seperti peluru. Media memiliki dampak yang mempengaruhi penguatan sikap suatu komunitas masyarakat. Dampak positifnya adalah ketika masyarakat mempunyai pembiasaan yang baik untuk hidup sehat dan berhati-hati dalam pergaulan.

Negatifnya dari efek media yang kuat yaitu jika masyarakat tidak mampu memfilter berita maka konten berita yang dikonsumsi baik berita benar maupun hoax akan mempengaruhi pemikiran dan mengganggu psikologi khalayak dan rawan menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran berlebih. Hal tersebut—kekhawatiran dan kepanikan berlebih, dapat menurunkan daya tahan tubuh secara signifikan, akhirnya efek media yang kuat menjadi dilemma tersendiri yang memerlukan solusi komprehensif.

Belajar dari praktik komunikasi melalui media yang dilakukan media lain yang dinilai berhasil, komunikasi media pada pandemi Covid-19 perlu difokuskan pada satu tujuan, yaitu upaya mencegah meluasnya penularan Covid-19. Segala informasi yang dibagikan oleh media mengenai Covid-19 membutuhkan kebijakan khusus dalam menyampaikan konten yang akan dikomunikasikan. Konten yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah bagaimana melakukan deteksi dini yang tepat terhadap gejala Covid-19.

Komunikasi media yang dilakukan pemerintah masih belum efektif karena terlalu memberikan keyakinan yang berlebihan dan inkonsisten. Untuknya DPR RI perlu meninjau kembali kebijakan dan mendorong pemerintah meningkatkan efektivitas komunikasi media pada pandemi Covid-19 dengan fokus pada tujuan menghentikan terjadinya pandemi. Juga, ketergantungan masyarakat terhadap media menuntut regulasi

yang lebih ketat dari pemerintah tentang kepemilikan media, konvergensi media dan korporasi media.

Dalam hal teknis terkait pengaturan *posting* berita dari *citizen journalism*—jurnalisme warga di mana warga memiliki hak dan kesempatan untuk memberikan berita atau informasi, dan portal berita online, serta penguatan keamanan *cybercrime* untuk meminimalisir *hoax* dan pembuat *hoax*. Dengan hal itu, semoga persepsi masyarakat yang timbul akibat efek media akan berkonotasi positif karena regulasi telah ditetapkan dengan kongkrit, sehingga mereduksi dampak-dampak negatif dari efek media massa maupun media sosial. []

Pandemi dan Menurunnya Tingkat Kesejahteraan

Mia Nursapitri, Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ

Virus Corona atau Covid-19 ini sejak awal kemunculannya pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China sudah mencuri perhatian. Banyaknya korban jiwa yang berjatuh karena virus ini bahkan sampai ada korban yang meninggal di jalanan ini menjadi perhatian bagi banyak negara. Pada awal tahun 2020 virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia salah satunya Indonesia yang pada akhirnya *World Health Organization* (WHO) memutuskan bahwa Covid-19 ini menjadi pandemi. Di Indonesia sendiri kasus orang yang positif Covid-19 ini berawal dari 2 orang hingga saat ini sudah mencapai 1 juta lebih kasus positif dan sudah ribuan orang meninggal dunia karena virus ini.

Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia pada Maret 2020 pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengurangi aktivitas masyarakat yang dirasa berisiko untuk membuat kerumunan, misalnya kantor, pusat perbelanjaan, bahkan sampai sekolah, dan perguruan tinggi yang mana pemerintah menerapkan *Work From Home* (WFH) untuk pekerja dan pembelajaran secara daring (dalam jaringan) untuk siswa dan mahasiswa agar mereka tetap belajar dan bekerja dari rumah, sedangkan untuk pusat perbelanjaan diberikan toleransi untuk membuka tokonya namun dengan jam-jam yang telah ditetapkan dan jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi.

Namun, karena adanya kebijakan tersebut banyak perusahaan merugi yang akhirnya memilih untuk memecat sebagian karyawannya atau menurunkan upah para pekerja. Bagi mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kebingungan apa yang harus dilakukannya setelah ini. Yang akhirnya membuat meningkatnya pengangguran di Indonesia. Dan akhirnya mereka harus memutar otak bagaimana mereka agar tetap bisa bertahan hidup dikondisi yang serba kekurangan seperti saat ini.

Dampak dari pandemi Covid-19 ini sangat terasa bagi hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Banyaknya hal yang dibatasi membuat masyarakat bingung apa yang harus diperbuat. Akhirnya banyak terjadinya kasus kriminal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan bunuh diri yang sering kita dengar dari pemberitaan-pemberitaan media. hal-hal diatas bisa terjadi karena menurunnya perekonomian masyarakat akibat pandemi ini membuat pelaku tertekan dan pada akhirnya para pelaku tidak bisa berpikir dengan akal sehatnya.

Tetapi banyak pihak juga yang berpendapa bahwa pelaku tindak kriminal ini memanfaatkan situasi PSBB karena kondisi lingkungan yang sepi sehingga pelaku dapat melancarkan aksinya dengan lancar. Hal ini membuktikan bahwasannya manusia akan melakukan hal apapun jika dalam keadaan terdesak dan mementingkan bagaimana cara mereka agar tetap bisa bertahan hidup dikondisi seperti saat ini. Namun selama pandemi ini pemerintah memberikan bantuan berupa sembako untuk wilayah Jadetabek dan uang tunai untuk wilayah lainnya, namun pada pertengahan pandemi terbongkar bahwasannya paket sembako untuk masyarakat ini dikorupsi oleh menteri sosial pada saat itu.

Hal ini membuat rakyat murka, mereka sedang menghadapi situasi sulit tetapi ada orang yang tidak bertanggung jawab dengan merasa tidak bersalahnya mengambil hak yang seharusnya untuk rakyat. Pada akhirnya ada pergantian menteri sosial dan bantuan paket sembako diganti dengan uang tunai atau yang biasa disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun bantuan-bantuan ini belum sepenuhnya dapat menutupi kekurangan pada masyarakat.

Pandemi Covid-19 ini pada akhirnya membuat menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat di mana banyak masyarakat yang akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena hilangnya mata pencaharian mereka karena pandemi ini bahkan bagi mereka yang berada di desa atau daerah tertentu ada yang memutuskan untuk putus sekolah karena tidak bisa melaksanakan belajar secara daring karena keterbatasan ekonomi yang semakin menjadi.

Namun, apakah setelah pandemi ini selesai kesejahteraan masyarakat bisa pulih atau bahkan meningkat? Mungkin hal ini bisa terjadi dengan kreatifitas masyarakat yang dibantu oleh pemerintah namun tetap dalam pengawasan agar pengelolaan bantuan tersebut agar bisa lebih terarah. Namun banyak dari masyarakat yang bisa bangkit selama pandemi ini dengan berbisnis secara *online*. Seperti halnya menjual makanan beku (*frozen food*) atau berjualan dengan mengandalkan aplikasi pemesanan makanan *online*.

Banyak yang bisa dilakukan jika masyarakat memiliki kreatifitas dan keahlian tertentu agar bisa bangkit dari permasalahan selama pandemi. Namun kekurangan masyarakat di Indonesia ialah kurangnya keterampilan yang dimiliki, atau

memiliki keterampilan namun tidak memiliki modal yang cukup untuk bisa melakukan keterampilan tersebut.

Sebenarnya dampak dari pandemi Covid-19 ini bukan hanya dari segi ekonomi saja masyarakat merasa kekurangan namun juga dari segi sosialnya. Karena adanya peraturan *social distancing* yang membuat masyarakat menjaga jarak antar satu individu dengan yang lainnya ini membuat banyak dari mereka yang akhirnya selalu berdiam diri di rumah. Hal ini membuat mereka menjadi takut jika ada dikeramaian.

Bahkan bagi anak-anak yang seharusnya bisa bermain dengan teman sebayanya baik di sekolah ataupun di lingkungan rumahnya saat ini hanya bisa bermain di rumah saja dengan orang tuanya. Banyak dari mereka yang akhirnya merasa takut, pusing, muntah-muntah, bahkan sampai pingsan saat berada di tempat yang ramai. Hal ini terjadi karena mereka merasa kaget dengan situasi ramai setelah sekian lama selalu berada di rumah hanya dengan keluarga. Ini bisa diatasi dengan merubah *mindset* bahwa tidak masalah saat berada di tempat ramai dan juga membiasakan diri kembali dengan berada di tempat yang ramai.

□

Hakikat Kesejahteraan bagi Masyarakat di Masa Pandemi

Fajar Raditya Fadhilah, HMKS

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera.

Kesejahteraan adalah bahasa yang klise didengar dan dimengerti semua orang, apalagi bila dikaitkan dalam konteks luas, dan berbicara secara kongkrit. Kesejahteraan sendiri memiliki arti yang menajubkan, yaitu Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Adapun menurut Imron (2012), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Untuk menilai sebuah keberhasilan dari kesejahteraan itu terbilang relatif, karan tingkat kepuasan masing-masing individu dan juga beberapa indikator seperti (1) Jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. (2) pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah di sini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

(3) kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Dari ketiga indikator ini dapat menjadi acuan untuk menjadi sejahtera dalam bermasyarakat. Tetapi sejatinya hal ini tidak mudah dilakukan pada masa pandemi, yang dimana berdampak pada semua aspek, tentunya ini bertolak belakang dengan indikator di atas. Bagaimana pada keadaan normal, banyak yang merasa belum ada pemerataan dalam ketiga indikator. Upaya-upaya mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri.

Hakikat kesejahteraan masyarakat yaitu seseorang atau kelompok yang hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Rasa takut ialah kegoncangan hati menyangkut sesuatu yang negatif di masa akan datang, sedangkan bersedih ialah kegelisahan menyangkut sesuatu yang negatif yang pernah terjadi. Kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kesehatan, ekonomi dosmetik rumah tangga, ras aman dan nyaman, serta kualitas hidup yang baik, namun kondisi saat ini justru membuat masyarakat mengalami kerentanan sosial yang membuat

produktivitas menurun, munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat, serta tingkat kriminalitas meningkat.

Munculnya berbagai kebijakan dari mulai PSBB sampai PPKM level 3 saat ini adalah bentuk upaya yang di buat pemerintah, walaupun belum efektif serta kurang tegasnya kebijakan yang dibuat. Berubah-ubahnya kebijakan membuat masyarakat sedikit bingung. Dalam hal ini dapat dikatakan padavmasa pandemi saat ini, hakikat sejahtera masih terbilang jauh, walaupun sudah melaukan upaya-upaya dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial dan lainnya, difokuskan dalam penanganan jaminan sosial, serta bantuan sosial terus digaungkan terlihat dari mana awal pandemi ini melanda, pemerintah memfokuskan pada melakukan sama halnya dengan pelayanan sosial, dimana layanan konseling terkait perseptif orang tentang virus covid ini menjadi paling urgensi, karna halnya dapat mempengaruhi pikiran mereka sendiri. Pekerja sosial juga melakukan pelayanan sosial fokus kepada penanganan psikososialnya.

Tidak bisa kita menutup mata, banyak hal yang dirasa masyarakat dapat melakukannya, insing manusia yang meningkat bila dihadapkan dengan situasi genting, menjadi faktor penting. Untuk bertahan di masa seperti ini. meningkatnya gotong royong menjadikan nilai plus sendiri, simpati sesama, kepekaan. responentilitas yang banyak dirasan oleh masyarakat untuk saling membantu satu sama lain menjadi motivasi sendiri di tengah pegebluk ini

Hakikat seperti ini seperti cukup untuk menggambarkan kondisi saat ini, walaupun untuk berhubungan ataupun bersosialisasi, responentilitas yang banyak dirasakan oleh masyarakat untuk saling membantu satu sama lain menjadi

motivasi sendiri di tengah pegebluk ini. Pilar pilar sosial juga turut membantu dalam penanganan psikososial, serta dalam pilar mahasiswa turut andil dalam penanganan penyebaran vaksin di daerah masing-masing, ini sejalan dengan proses penanganan pemutusan rantai virus Covid-19 di Indonesia.

Peran segala aspek membuat penanganan, serta menjadikan hakikat kesejahteraan di masa pandemi ini, terlihat dengan jelas walaupun belum optimal. Tetapi tidak melunturkan semangat khalayak umum, yang dimana ingin mengurai kerentanan sosial serta juga meningkatkan hakikat kesejahteraan bagi semua orang. Serta mengindahkan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. []

EPILOG:

DISRUPSI PENDIDIKAN

Oleh: Djoni Gunanto, S.IP., M.Si.



Era disrupsi mendorong terjadinya digitalisasi Pendidikan yang memaksa semua elemen berubah secara mendasar dan tak terduga, perubahan terjadi karena proses yang tidak berjalan linear. Cakupan perubahan cukup luas dari berbagai sector, terutama Pendidikan yang menjadi faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Sebuah tatanan baru yang hadir menggantikan tatanan lama yang sudah tidak sesuai dengan perubahan zaman. (Bashori & Bashori, 2018). Dewasa ini era digitalisasi dalam Pendidikan sudah menjadi tantangan, peluang bahkan ancaman. Bagi mereka yang bisa tetap bertahan akan menjadi sebuah peluang pada disrupsi Pendidikan karena banyak hal yang dijadikan secara instan mempermudah kegiatan manusia dalam beraktivitas bahkan bisa memanjakan sebuah kehidupan dan entitas manusia. ancaman bagi manusia karena tidak sanggup mengikuti perubahan.

Pendidikan sebagai upaya manusia dalam mengembangkan dan mencari sebuah ketidaktahuan atas hal menjadi sebuah pemikiran sendiri bagi manusia untuk mencari tau hal yang sebenarnya, perubahan terjadi pada dunia Pendidikan begitu signifikan banyak yang gagap akan hal ini, banyak juga yang dianggap sebagai kemudahan. Digitalisasi sebagai hal yang memiliki perubahan mendasar atas hal disrupsi menjadi yang penting bagi kelangsungan Pendidikan. Perubahan perlu terjadi dalam sebuah kelompok guna beralihnya sebuah tatanan kehidupan baru yang mendatang serta yang diinginkan untuk mencapai efektivitasnya. (Winardi, 2005).

Saat ini metode belajar pada setiap kelas Pendidikan mengalami perubahan yang mendasar, kegiatan pengajaran

diawali dengan pemanfaatan teknologi yang sebatas persentasi lewat *power point* saat ini berpindah menjadi persentasi virtual pada era disrupsi ini, perubahan semacam ini bukan terjadi pada hal dunia Pendidikan melainkan hampir pada seluruh aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, bisnis, dan Pendidikan (Salsabila dkk, 2020) *Salsabila, Unik Hanifah dkk. (2020). Peran Teknologi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Era Disrupsi. Jurnal On Education, 03(01)*, kali ini penulis tidak ingin melibatkan era disrupsi sebagai kolaborasi perubahan zaman pada konteks pandemic covid-19, era disrupsi sudah dikemukakan dimuka oleh para tokoh lainnya, disrupsi awalnya dipopulerkan oleh Clayton Christensen dan Michael Porter sebagai arus berpikir dalam bisnis untuk saling kompetitif dan harus menang, kedua Profesor Harvard Businnes School pada 22-33 tahun silam.

Pada dasarnya disrupsi sangat memiliki pengaruh besar pada dunia Pendidikan, fenomena digitalisasi dari evolusi teknologi mengubah hampir setiap tatanan kehidupan. Ancaman terhadap Pendidikan saat ini mengakibatkan sebuah organisasi melupakan kemurniannya, ada sekolah sebagai pusat Pendidikan manusia dalam mengemban ilmu dijadikan sebagai media bisnis sebagai tujuan utama (Fikri, 2019). Lebih lanjut dijelaskan John Micklethwait persaingan bisnis sudah merambat pada sektor Pendidikan, dimana lembaga Pendidikan harus memberikan hasil luaran kepada murid yang produktif, tapi juga pemegang saham. (John Micklethwait, 2007).

Demokrasi, Politik, dan Gerakan Mahasiswa

Faktor politik dan militer menjadi penyebab tumbuhnya demokrasi pada tahun 1943-1962 pada 25 negara di eropa, penyebab utama tumbuhnya sosial dan ekonomi.

Kemajuan urbanisasi, industrialisasi dan bidang ekonomi serta meningkatkan jumlah kelompok kelas menengah oleh Huntington menjadi alasan utama tumbuhnya demokrasi di Eropa. (Akbar, n.d. 2016). Wacana perkembangan demokrasi sangat kencang pada saat abad 20-an, gagasan yang berawal dari masa Yunani kuno sudah sejak lama diperkenalkan di Eropa, perkembangannya dianggap relevan karena sistem monarki di Eropa yang absolut tidak sesuai dengan masyarakat.

Pada abad 19 muncul pandangan-pandangan baru dari segi negative atas akibat dampak kepaakan dari hidup di peradaban teknologi. Selain itu juga berpandangan terhadap akibat-akibat yang tidak dapat diramalkan dari tindakan politik yang paling baik sekalipun. Oleh karena itu dalam pembahasan lebih lanjut gagasan kedaulatan rakyat berfokus pada pemikiran Max Weber (1864-1929) dan Josep Schumpeter (1883-1950). Mereka memiliki ide yang sama tentang kehidupan politik, di mana mereka dapat berpartisipasi dalam demokrasi dan pengembangan pribadi atau kolektif, di mana bahkan jika ada kesempatan, kekuatan sosial besar selalu terancam. Kedua masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik di negara, tetapi demokrasi hanyalah salah satu cara untuk memilih pengambil keputusan dan menyingkirkan sisanya. (David Held, 2006) *Models of Democracy* (terj), Jakarta: The Akbar Tandjung Institute.

Pejuang demokrasi haruslah mengamankan baris politik dalam mempertahankan demokrasi pada sistem otoriter, proses politik yang terjadi pada sebuah negara merupakan langkah strategis bagi individu dalam mengambil sikap atas hal prinsip demokrasi. Locke sepakat akan hal mayoritas menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dari minoritas, hal ini menjadi

sebuah gambaran dalam negara Indonesia bahwa mayoritas selalu menjadi pemenang dalam hal apapun selagi masih menganut sistem demokrasi otoritarian. Otoritas pemimpin sebagai penguasa membuat setiap keputusan bukan berdasar atas keinginan melainkan memuaskan (Herbet Simon, 1947). Tidak lagi bertumpu pada aspirasi apalagi kepada kebutuhan masyarakat yang diinginkan, kebutuhan masyarakat Sebagian bisa dianggap sebagai kelompok kepentingan atas dasar suksesi pemilihan calon kepala negara/daerah.

Perjalanan demokrasi sering diiringi oleh mahasiswa sebagai Gerakan sosial yang membuktikan sejarah, Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa senantiasa berdiri pada garda terdepan dalam setiap perubahan sejarah yang terjadi di Indonesia, bahkan karena peran kesejarahannya tersebut mahasiswa diperibahasakan sebagai generasi patah tumbuh hilang berganti, tentunya kita tidak akan pernah lupa bagaimana peranan Budi Utomo-sebuah perkumpulan mahasiswa sekolah STOVIA-mempelopori perjuangan merebut kemerdekaan melalui jalur organisasi pada tahun 1908, kepeloporannya ini dicatat sebagai pionir serta menjadi titik awal pergantian strategi perjuangan kemerdekaan, dari bentuk tradisional perlawanan fisik beralih ke bentuk pergerakan organisasi modern. (Suryadi A.C, 1999) Adi Suryadi Culla, Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).

Kemerosotan terjadi pada pasca Orde Baru, dimana setiap mahasiswa masih dikekang akan waktu dan perkuliahan di kelas untuk memenuhi presensi kehadiran 75%. Hal ini tidak dianggap tabu bagi mahasiswa karena sebagai masyarakat

pendidik memiliki aturan untuk tetap mengikuti skema Pendidikan yang berlaku, tanpa sadar mahasiswa akan selalu disibukan oleh tugas kuliah yang menjadi beban setiap waktu bukan sebagai beban atas keluhan masyarakat yang terus mengerutu. Jadi mahasiswa harus memiliki karakter karena mahasiswa memiliki sejarah sendiri dalam Gerakan sosial perubahan zaman, kelahiran orde baru sesungguhnya tidak lepas dari sejarah mahasiswa Angkatan 1966 yang didukung penuh oleh pasukan militer Angkatan Darat (AD).

Hasil konsolidasi mahasiswa awal pemerintahan pada masa orde baru menjadi bulan madu antara militer dengan mahasiswa, pada masa tersebut besar harapan bangsa dan masyarakat bahwa setelah orde baru akan tumbuh benih harapan baru yang bersikap akomodatif dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara. (Saefulloh Fattah, 2010) Eep Saefulloh Fattah, Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok. (Jakarta: Burung Merak Press, 2010). Karena itu keterlibatan mahasiswa pada saat ini sangat dibutuhkan dalam memberikan pandangan dan cerminan bangsa atas proses pemerintahan yang demokratis.

Pariwisata, Budaya, dan Olahraga

Perbedaan Pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung terhadap terpuruknya sebuah tempat wisata di Indonesia yang menjadi daya tarik Indonesia sebagai negara budaya lama kelamaan akan tenggelam ditelan masa, berbagai budaya di Indonesia diselaraskan dengan pariwisata yang ada dari berbagai daerah secara keseluruhan. Sehingga menjadi nilai lebih bagi wisatawan, dunia Pendidikan menjadi respon penting dalam proses peralihan zaman sebagai bentuk disrupsi, dimana

pertumbuhan dan perkembangan mesin menjadi sarana bersama manusia dalam pemecahan masalah yang terjadi, sehingga produk, promosi, distribusi serta harga jual (4P) tidak lagi mencukupi bagi sarana pengembangan pariwisata dengan perubahan zaman yang begitu cepat (Akib, Erwin, 2020). Organisasi yang didalamnya memiliki individu sebagai motor penggerak tidak sebatas melihat peluang untuk dipromosikan melainkan mampu melihat jauh visi, misi yang akan ditunjang sebagai strategi dan taktik dalam menciptakan *sustainable competitive advantage* bagi perusahaan tersebut (Gunawan, 1999) dalam (Marcus Remiasa, 2005).

Budaya sebagai karakter bangsa memiliki nilai sendiri dalam membangun sebuah negara yang besar dan kaya akan budaya, perkembangan teknologi perlu menjadi perhatian sendiri untuk menjadikan sebuah perkembangan zaman menjadi kolaborasi teknologi yang memiliki budaya asli bangsa. Sehingga nilai akan budaya terhadap perkembangan teknologi menjadi seimbang dalam tatanan Pendidikan, tidak lagi budayawan hanya memperkokoh sebuah tatanan budaya untuk terus melestarikan demi menjaga alur sejarah. Bangsa yang besar merupakan bangsa yang pro-aktif bukan sebatas mengikuti perubahan zaman melainkan lebih dulu merubah tatanan organisasi sebelum terjadinya perubahan lingkungan. Konsep wawasan nusantara yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja' menjadi sebuah tatanan baru bagi kesatuan bangsa Indonesia, yang merupakan kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, kesatuan pertahanan dan keamanan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Pengembangan budaya yang melebur kemasyarakatan menjadi kebiasaan yang dianggap benar, seperti pertandingan

sepak bola yang memiliki ajang bergengsi di dunia maupun dalam negeri, pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola sudah menjadi hal wajar meski tidak dapat dibuktikan secara hukum (bicara realita dilapangan), atau yang lebih sederhana pertarungan antar tim yang dilakukan penonton marak terjadi dalam pertandingan sepak bola. Akibat hal tersebut kemajuan dan perkembangan profesionalitas sepak bola menjadi semakin diragukan oleh dunia dan masyarakat karena indicator setiap pertandingan bukan untuk kemenangan orang banyak melainkan kelompok kepentingan.

Pendidikan dan Pelayanan Publik

Sudut pandang lain dalam meneropong sebuah Pendidikan untuk peningkatan pelayanan public yang berbasis akuntabilitas, Indonesia menyebut hal tersebut Good Governance merupakan tata kelola pemerintah yang melaksanakan penyediaan *Public Goods* dan *Services*. Konsep tersebut sudah lama dikemukakan pada ratusan tahun lalu dimana prinsip akuntabilitas, transparansi serta keterbukaan ruang dan informasi bagi public menjadi sendi-sendi negara bagi negara demokratis modern. Kasman Abdullah berpendapat bahwa *good governance* terminology yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, keberadaannya saat ini menjadi refleksi bagi negara dalam merancang pemerintahan agar berjalan demokratis.

Pelayanan publik sebagai pemberian jasa/barang yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terkandung dalam UU No 25 Tahun 2009. Menurut Moenir (2001:13) pelayanan public merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai landasan materil melalui sistem, prosedur, dan metode demi memenuhi kehidupan orang lain sesuai

dengan hak dan kewajibannya. Permasalahan yang sering terjadi pada pelayanan public di setiap instansi dewasa ini adalah pelayanan public berbasis digitalisasi (*E-Government*) tidak semua instansi pemerintah memberikan pelayanan publik berbasis digital, penerapan *E-Government* di kota Tomohon masih bersifat *government to government* (Syalom M.C. Lenak, dkk. 2021). Terdesaknya organisasi atas hal perubahan lingkungan saat pandemic membuat maraknya instansi yang sudah banyak memiliki *website* sebagai bentuk digitalisasi dalam memberikan informasi atas keterbukaan dan bentuk pelayanan digital, hal ini patut diapresiasi sebagai perubahan intern-aktif dalam sebuah organisasi.

Pendidikan menjadi sektor pelayanan publik yang menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mendidik anak bangsa untuk melanjutkan estafet kepemimpinan negara, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1). Oleh karena ini pemberian pelayanan publik pada Pendidikan harus merata pada setiap daerah yang berada pada negara Indonesia. Berdasarkan PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Sedangkan untuk perguruan tinggi 30 mahasiswa.

Media dan Kesejahteraan Masyarakat

Dewasa ini perkembangan media masa menjadi *trend* yang sering dibicarakan banyak kalangan dan digunakan sebagai bentuk popularitas untuk meningkatkan eksistensi seseorang/kelompok, memberikan pandangan baru atas informasi yang diberikan secara *toxic*. Media masa memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan zaman atas

perubahannya berbagai informasi dan penyampaian pendapat mudah dilakukan dan dapat didengar oleh semua orang tak terbatas, karena itu pembatasan penggunaan media sosial perlu dilakukan melalui pendidikan keluarga dan sekolah/Perguruan Tinggi, bukan membatasi untuk menggunakan media sosial lebih jauh menggunakan media sosial secara cerdas dan cermat. Masalah di dusun Pakis I mengakibatkan interaksi sosial di kalangan remaja dan individu semakin lemah (Mawari Ismail, 2019).

Masyarakat sebagai sasaran pemerintah dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, kesejahteraan menjadi poin penting bagi tugas negara untuk memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, meskipun dinilai berat dalam pelaksanaan hal ini sudah menjadi kewajiban Negara. satu contoh kesejahteraan masyarakat dalam bidang teknologi yang memanfaatkan teknologi dalam bidang pengembangan pertanian memiliki dampak yang berpengaruh memberikan pemanfaatan media komunikasi dan informasi dengan bentuk brosur dan *leaflet*. Bentuk informasi ini memiliki jangkauan luas disbanding komunikasi tatap muka (Minarti, 2005). []

Profil Penulis



ASYRAF AL FARUQI TUHULELE – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat FISIP UMJ. Asyraf lahir di Jakarta tahun 1999, dan saya anak kedua dari tiga bersaudara. Saat ini saya aktif di beberapa organisasi mahasiswa baik intra kampus maupun ekstra, beberapa kali saya menjadi pembicara dalam sebuah kajian/seminar, menjadi moderator, dan aktif menulis di media massa secara online maupun offline.



MUHAMMAD SULAIMAN – Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UMJ. Muhamad Sulaiman merupakan nama lengkap saya, namun kerabat lebih akrab memanggil Sule. Lahir di Jakarta 21 tahun yang lalu pada bulan Mei. Pemuda minang, namun tidak pandai dalam berbicara bahasa minang, sejujurnya heran. Namun ya begitu deh kira-kira hehe. Saya saat ini sedang sibuk dalam urusan akademik dan organisasi serta ingin mumpurnakan segera. Saya senang sekali dalam melakukan perjalanan. Karena dari perjalanan umumnya seseorang mendapatkan banyak sekali pengalaman.



HARITS KHOLILURRAHMAN – Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP UMJ. Saya Harits Kholilurrohman kelahiran Pontianak 24 Maret 1999. Anak ketiga dari lima bersaudara saat ini saya aktif menjadi Pegiat PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) LSM yang bergerak di bidang riset dan advokasi kebijakan publik di Jakarta, pernah aktif diorganisasi kemahasiswaan, dan saat ini mengikuti beberapa organisasi kepemudaan tingkat daerah.



JODHI HERMAWANSYAH – Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMJ. Jodhi Hermawansyah, panggil saya Jodhi. Lahir di Jakarta, 6 Januari 2000, Kamis Wage dalam kalender Jawa. Darah Jawa mengalir deras, walaupun tidak biru, karena yang biru hanya HIMAKOM FISIP UMJ. Aktif berorganisasi dilembaga Intra maupun Ekstra kampus. Hobi yang menyehatkan Basket, yang mengasah pola pikir menonton video edukasi, membaca –dalam katergori jarang. Ingin menjadi Menpora RI, fokus pada isu kepemudaan, olahraga, dan bumi.



RAJA FAIDZ EL SHIDQI – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UMJ. Halo! Perkenalkan nama saya Raja Faidz el Shidqi biasa dipanggil Raja atau Faiz, saya lahir di Kota Depok, 31 Januari 2000. Cukup banyak cerita hidup yang saya dapatkan selama ini, semenjak bersekolah di SMP

Muhammadiyah 4 Depok lalu melanjutkan ke SMA Muhammadiyah Sawangan sebelum akhirnya memasuki Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan memiliki berbagai macam teman yang memberikan perspektif baru dalam memandang kehidupan. Menjadi salah satu kontributor penulisan buku seperti ini adalah suatu hal yang menyenangkan karena bisa menjadi cara mengeluarkan pikiran, keluh kesah, dan sebagainya untuk dibaca oleh orang banyak dengan tujuan sebagai sebuah pembelajaran dan renungan bersama.



RIVAL LAOSA – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UMJ. Rival Laosa, Lahir di Luksagu Sulawesi Tengah, 22 Oktober 2001. pada malam yang terbelunggu oleh gelap dan menanti pergantian hari. Hidup di semesta yang berwarna namun warna terbaik adalah campuran paradigma kehidupan. Saya aktif dalam organisasi sebagai identitas sebatas di intra dan ekstra dunia pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta tanpa melupakan akademik sebagai prioritas. Hobi melintas alam pikiran dengan raga yang sadar ataupun terlelap, baca dan bercerita. Jauh dari tanah yang bertuan untuk mengejar inti kehidupan. Kembali ke akhir ini dengan motto "yang baik belum tentu benar dan yang benar belum tentu baik, kesalahan bukan dimalaikatkan dan kebenaran hanyalah milik Ketuhanan"



ASSYIFFAH AULIA – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UMJ. Saya Assyiffah Aulia, biasa dipanggil Syifa. Wanita kelahiran asal Jakarta, 18 Juni 2002. Ingin memiliki jejak ruang dalam lingkup yang menalari jalan tapak kehidupan. Aktif dalam organisasi intra maupun ekstra kampus. Menjelajahi lautan bacaan ataupun membuat suatu karya tulisan adalah salah satu ketertarikan yang saya miliki sekarang.



ANNISA MISKIYAH – Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UMJ. Saya Annisa Miskiyah, biasa dipanggil Icha. Saya lahir di Jakarta, untuk saat ini saya turut andil dalam himpunan jurusan serta aktivitas diluar kampus. Beberapa kali menjadi pembawa acara dan moderator di kampus serta memiliki hobi menikmati alam dan tertarik dalam hal baru.



ENNIKE RAHAYU LESTARI – Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UMJ. Assalamu'alaikum, Hi, hi, haloo! Nama saya Ennike Rahayu Lestari, biasa dipanggil Tari. Asal dari Sumatera tepatnya dari Provinsi Bengkulu, saya sendiri ikut aktif bergabung dalam beberapa organisasi Intra dan Ekstra kampus, mempunyai banyak hobby dan senang menjelajah.



serta anggota kepanitiaan di beberapa acara kampus.

RISMA WATI – Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UMJ. Nama lengkap Risma Wati. Sering disapa Risma. Lahir di Tangerang, 02 Maret 2001. Saat ini, tengah menempuh studi strata satu di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mempunyai hobby melukis dan aktif berorganisasi di kampus,



yang jauh dari kata "nyambung" sama dunia kampus aku tapi sejauh ini aku bisa mengaturnya karna aku suka belajar hal baru.

ULUNG DIAH RAHMAWATI – Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UMJ. Hi! Aku Ulung Diah Rahmawati, biasa dipanggil Ulung. Sekarang ini aku tinggal di Kota Tangerang Selatan, aku cukup aktif dalam himpunan jurusan dan berbagai kegiatan di luar kampus. Aku punya hobi dan kegiatan



MIA NUR SAFITRI – Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ. Saya Mia Nursapitri, biasa dipanggil Mia. Lahir pada hari Senin tanggal 7 Mei 2001 di Kuningan, Jawa Barat. Aktif dalam beberapa organisasi baik internal maupun eksternal. Si penyuka warna hijau tetapi lebih nyaman menggunakan

warna hitam. Katanya sekecil apapun hal yang kamu rasakan harus diungkapkan entah secara langsung ataupun tidak langsung.



FAJAR RADITYA FADHILLAH – Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ. Saya Fajar Raditya Fadhilah, panggil saya kiting, saya lahir 7, Oktober 2000 Lahir di Jakarta, keturunan jawa. Aktif di beberapa organisasi baik internal maupun eksternal, himpunan dan IMM, Semua sama yang berbeda hanya orangnya aja.

Hoby gua jalan-jalan aja ketempat baru, fokus ke pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan orang banyak, dan juga kejiwaan orang.



M. FEBRIAN ALI – Hizbul Wathan Football Club FISIP UMJ. Saya M. Febrian Ali adalah pemuda berasal dari Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang yang lahir pada tanggal 3 Februari 2000 di Jakarta. Perjuangan adalah implementasi kata-kata! Selama mengikuti studi di Universitas

Muhammadiyah Jakarta saya aktif di dua organisasi Internal kampus yaitu Himpunan dan LSO. Saya juga merupakan pemuda yang memiliki hobi berolahraga khususnya Sepak Bola dan Futsal. Di kampus bersama HWFC FISIP UMJ menjadi wadah saya untuk mengembangkan skill dan potensi diri dalam dunia Sepak Bola dan Futsal. Salam Sehat!



MOHAMMAD RIZA FATHONI – Lembaga Musik Pervagatus FISIP UMJ. Mohammad Riza Fathoni, biasa dipanggil Riza, saya lahir di Tangerang, Selasa, 7 November 2000, memiliki garis keturunan Jawa dari Rembang-Pekalongan. Dengan di besarkan di keluarga yang mengalir darah seni, mungkin itulah yang menjadi salah satu aspek saya mendalami seni musik khususnya instrumen Bass. Selain itu, latar belakang keluarga saya sangat kental dengan Muhammadiyah dan mejadi aspek saya berorganisasi khususnya di IMM serta di Lembaga Musik Pervagatus. Biarkan orang lain mendeskripsikan saya seperti apa, saya tetap saya, berani beda dengan yang lain.



ADRIKA FEBRIANY PUTRI – Saman FISIP Muhammadiyah Jakarta. Adrika Febriany Putri, yang biasa dipanggil dengan nama Rika. Lahir di Tangerang, 3 Februari 2003. Sejak kecil, saya memang tertarik dengan tarian tradisional, dengan itu, saya pernah belajar tarian tradisional di salah satu sanggar yang berada di Pamulang. Maka dari itu, sampai sekarang saya ingin lebih mengembangkan lagi bakat kesenian saya dengan mengikuti organisasi Saman FISIP Muhammadiyah Jakarta, yang di mana sebagai penerus bangsa Indonesia ini akan terus melestarikan salah satu budaya tradisional yang ada di Indonesia.



ARIEF MARDIANSYAH - Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMJ. Arief Mardiansyah biasa dipanggil Begeng biar akrab karna saya orangnya so kenal, so deket makanya panggil begeng karna itu panggilan akrab saya. Saya lahir di Tangerang, Kamis, 29 Maret 2001, keturunan betawie tulen dibesarkan di Tangerang Selatan tepatnya dipamulang. Saya memiliki hobi motor klasik yang dimana saya memiliki motor klasik yaitu vespa, suka bongkar dan service sendiri. Saya seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang aktif di dua organisasi yaitu HIMAKOM FISIP UMJ & PK IMM FISIP UMJ. Saya tetaplah saya biarkan mereka berfikir negatif tentang saya karna hanya orang terdekat yang mengetahui saya sepenuhnya.